

**PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI
DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HENDRI SETIAWAN

NPM : 1421020144

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI
DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

HENDRI SETIAWAN

NPM : 1421020144

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing II : Frenki, M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

M. Amien Rais adalah salah seorang tokoh demokrat di negara Indonesia. Yang selalu memberi kritikan kepada para pemimpin bangsa dan negara terutama pada era Orde Baru (Orba) (pemerintahan Presiden Soeharto). Dimasa Orde Baru beliau berani membuat opini tentang “*suksesi nasional*” terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto, dimana pada waktu itu istilah suksesi kepemimpinan nasional adalah hal yang tabu dan jarang sekali yang berani mengeluarkan ide yang brilian tersebut di muka publik. Ide tersebut dalam pandangan M. Amien Rais bertujuan semata-mata adalah merasa prihatin dan ironis melihat mandegnya proses demokrasi di negara Indonesia, padahal sistem pemerintahan Indonesia adalah berasaskan demokrasi.

M. Amien Rais menekankan sistem demokrasi yang sesuai dengan nasionalisme menurut ajaran Islam bukan nasionalisme yang tanpa landasan. Dengan demikian persoalan-persoalan demokrasi selalu dikaitkan dengan agama dan negara, sehingga menurutnya antara agama, negara dan demokrasi tidak dapat dipisahkan.

Fiqh siyasah sebagai sebuah metode pemikiran melihat bahwa kalangan ummat Islam telah terjadi perbedaan pemikiran dan pandangan dalam mensikapi masalah sistem, bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia menginginkan agar sistem, bentuk pemerintahan tersebut (demokrasi) diganti dengan sistem dan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam *Tujuh Kata dalam Piagam Jakarta*, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah menganut agama Islam.

Diketahui bersama bahwa obyek fiqh siyasah adalah pembuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus suatu negara dengan menggunakan suatu sistem tertentu termasuk sistem demokrasi sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap konsep pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruangan perpustakaan yang berkaitan dengan demokrasi. Adapun metode analisis data digunakan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dengan menggunakan beberapa metode diatas akhirnya ditemukan bahwa pandangan M. Amien Rais yang mensingkronkan nilai-nilai demokrasi secara umum dengan nilai-nilai demokrasi menurut Islam adalah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Hendri Setiawan
NPM : 1421020144
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG
DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Faisal, S. H., M. H.
NIP. 195512251985031002


Frenki, M. Si
NIP. 198003152009011017

Mengetahui
Ketua jurusan Siyasah Syar'iyah


Drs. Susiadi AS., M. Sos. I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG

DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH disusun oleh

Hendri Setiawan, NPM. 1421020144, Program Study: Hukum Tata Negara

(Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah

UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: Jum'at 22 Juni 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji I : Drs. Maimun, S.H., M.A.

Penguji II : Frenki, M.Si.



DEKAN

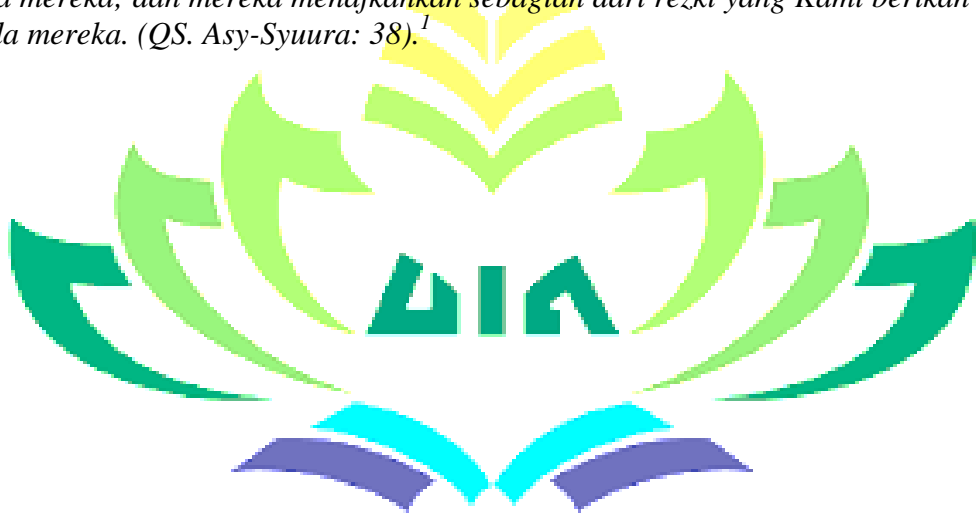
Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.

NIP.197009011997031002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. Asy-Syuura: 38).¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Surakarta: Al-Karim, 2009), h. 487.

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kehadiran Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Abdi Suyanwi dan Ibu Dalimah, Bapak Agus Suyono dan Ibu Siti Asnah yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendo'akan saya disetiap langkah dan mengajarkan saya dari kecil yang benar-benar polos maupun suci hingga dewasa saat ini untuk selalu menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
2. Kakak dan Adik saya tercinta yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk semangat menyelesaikan kuliah ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama menuntut ilmu di UIN Raden Intan Lampung, dan sabar menunggu akan keberhasilanku.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya cintai.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Hendri Setiawan, lahir pada tanggal 08 Agustus 1996 di Desa Way Petai Kecamatan Sumber jaya, Kabupaten Lampung Barat. Anak ketiga dari empat bersaudara. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 02 Way Petai (Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 02 Sumber Jaya (Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat) lulus tahun 2011
3. SMAN 01 Sumber Jaya Lampung Barat lulus tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi antara lain:
 - a. Bidang IT dan desain KOPMA UIN RIL 2017-2018
 - b. HMJ Fakultas Syari'ah 2016-2017
 - c. BEM Fakultas Syari'ah 2017-2018
 - d. Kader PMII UIN Komisariat UIN Raden Intan Lampung
 - e. Wakil Ketua bidang politik Hukum dan Ham Anak Muda Indonesia (AMI) DPC Lampung Tengah 2018-2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karya nyata membumi.

Skripsi ini berjudul **“PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M, Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS, M. Sos. I. selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah.
4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.

5. Frenki, M.Si. selaku pembimbing II selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.
6. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk Bapak dan Ibu, kakak, adik dan kekasih. Terimakasih atas dukungan dan do'a nya selama ini serta bantuan yang tak terkira baik yang bersifat materi maupun non materi.
9. Kepada sahabat-sahabatku tercinta Wp Bro/sist yang selalu menemani dari aku kecil hingga saat ini.
10. Untuk yang selalu mendorong serta memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini dari awal hingga selesainya skripsi ini yaitu sahabat seperjuangan Pulung Riyanto, S.Sos., Slamet Wiyanto, S.H., Robert Nando, S.H., Mery Hartanto S.H., Khairul Ramadhan S.H., Rahmad Reno, S.Sos.,
11. Keluarga besar Kopma UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan nilai-nilai positif.
12. Keluarga besar PMII Komisariat UIN RIL Rayon Syari'ah.
13. Keluarga besar Siyasah A angkatan 2014.
14. Kelurga besar KKN 121 desa Pulau Tengah yang telah menemani selama 40 hari di desa Pulau Tengah.
15. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung

Akhirnya, dengan iringan terimakasih do'a dipanjatkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, 22 Juni 2018

Penulis

Hendri Setiawan
NPM.1421020144



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PESEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	
A. Pengertian Demokrasi	14
B. Prinsip-prinsip Demokrasi	27
C. Demokrasi di Indonesia.....	39
D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Demokrasi di Indonesia	47
BAB III PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA	

A. Biografi M. Amien Rais	
1. Riwayat Hidup M. Amien Rais	58
2. Karya-Karya M. Amien Rais	61
B. Pokok-pokok Pemikiran Politik M. Amien Rais Tentang Demokrasi	68
C. Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais	
1. Negara dan Demokrasi	70
2. Demokrasi dan Masyarakat Kontemporer	74

BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA MENURUT M. AMIEN RAIS

A. Pemikiran M. Amien Rais Tentang Demokrasi di Indonesia.....	82
B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Penutup	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis membahas lebih lanjut skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”, untuk menghindari kesalah pahaman terhadap skripsi ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut adalah sebagai berikut:

Pemikiran adalah memikirkan suatu kebenaran yang sudah ada untuk mendapatkan kebenaran yang baru, jadi pemikiran berarti suatu pandangan atau pendapat seseorang atau kelompok untuk melahirkan suatu gagasan.²

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan, kebijaksanaan, siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain.³

M. Amien Rais adalah seorang tokoh Demokrasi ulung dan Tokoh Reformis, beliau lahir di Solo pada tanggal 26 April 1944. Beliau banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Beliau adalah pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) dan beliau pernah menjabat sebagai ketua MPR RI pada tahun 1999-2004.⁴

²Hasbullah Bakry, *Sistematika filsafat* (Jakarta: Wijaya. 1979), h. 38.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kedua) (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 320.

⁴Muhammad Najib dan Kuat S, *Amin Rais Sang Demokrat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 18.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan prantara wakilnya. Atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warganya.⁵

Indonesia adalah Negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia.⁶

Perspektif ialah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat seorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang maupun untuk masa yang akan datang.⁷

Fiqh Siyasah atau Siyasah Syar'iyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat.⁸ Tetapi yang di maksud siyasah di sini adalah siyasah syariyah yaitu sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat Islam dan sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bernegara.⁹

⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit.*, h. 37.

⁶ *Ibid.*, h. 532.

⁷Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Popolar* (Edisi Lengkap), Cetakan Pertama (Surabaya: Gita Media Press, 2006), h. 371.

⁸J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 230.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah suatu telaah tentang pemikiran politik M. Amin Rais tentang implementasi demokrasi di Indonesia, kemudian dianalisa dengan pendekatan Fiqh Siyasah atau siyasah syar'iyah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

M. Amien Rais adalah tokoh reformis dan “pendekar” demokrasi yang ide-ide dan gagasannya khususnya dalam hal demokrasi diakui banyak pihak memberi kontribusi bagi perkembangan proses demokratisasi di Indonesia. Sehingga penulis berpendapat bahwa mengetahui serta mengkaji pemikiran politik M. Amien Rais khususnya dalam hal demokrasi.

2. Alasan Subjektif

- a. Data dan literatur yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- b. Masalah yang sedang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni, yaitu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

C. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua negara. Istilah boleh sama, tetapi isi dan cara perwujudannya bisa berbeda-

beda dari negara yang satu kenegara yang lain. Itu yang terjadi dengan istilah “demokrasi” dalam kehidupan masyarakat modern-kontemporer.

Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintahan oleh rakyat (*demos* berarti rakyat; *kratos* berarti pemerintahan). Jadi “*demos, cratein*” atau “*democratos*” adalah keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan rakyat.¹⁰ Menurut Meriam Boediarjo demokrasi adalah Government Ruled by the people atau ungkapan umum yang populer yaitu *Government of the people, by the people and for the people* atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan dalam penggunaannya sebagai ideologi negara mempunyai banyak makna dan nama, hal ini disebabkan karena banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat di dunia. Meluasnya minat untuk menegakan demokrasi terutama dikalangan negara-negara dunia ketiga sejak awal abad ke-20 menunjukkan bahwa partisipasi rakyat yang besar dalam pengambilan keputusan politik adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.¹¹

Setidaknya, tuntutan demokratisasi beberapa wilayah Islam khususnya Indonesia itu di dorong oleh dua faktor berikut : Pertama, secara faktual di beberapa kawasan ini, utamanya yang menganut sistem politik sentralistik atau monarki, sistem politik yang ada cenderung represif dan bahkan korup. Pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi berjalan lamban dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Kenyataan ini tidak bisa tidak menimbulkan

¹⁰Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 50.

¹¹Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (Malang: UMM Pres, 2002), h. 15.

tuntutan baru, utamanya di kalangan muda yang ingin melihat negaranya lebih demokratis. Kedua, di beberapa kawasan Islam itu muncul kelas-kelas intelektual yang secara serius dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap suatu keharusan bagi peradapan manusia. Kaum intelektual generasi baru itu tumbuh subur terutama di negara yang sistem politiknya relatif memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.

Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya sebagai demokrasi Soviet atau di Indonesia yang pada awal kemerdekaannya menggunakan istilah demokrasi terpimpin yang setelah itu pada masa “orde baru” berubah menjadi demokrasi pancasila. Padahal istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa).¹² Dan dari penggunaan istilah demokrasi pada kedua Negara tersebut berdasarkan catatan sejarah yang telah ada, di dua Negara tersebut sama sekali tidak menunjukkan keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan demokrasi hanyalah menjadi slogan pemerintah untuk menarik simpati rakyat saja.

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator borjuis

¹²Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi* (Jakarta: Fh UII Press, 2003), h. 140.

dan proleter), sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidentil, dan sistem pemerintahan campuran.¹³

Perbedaan itu dapat menunjukan kepada cara penunjukanya daripada wakil-wakil rakyat, dapat pula mengenai cara penyusunanya daripada badan perwakilanya, sehubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan lainnya khususnya badan yang menyelenggarakan pemerintahanya, tugas dan wewenanganya dari pada badan-badan perwakilan dan lainnya. Semuanya itu menunjukan bahwa jarang sekali ketatanegaraan suatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan yang lainnya, walalupun asasnya sama yaitu asas menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan oleh rakyat (demokrasi) dengan jalan perwakilan. Kesulitan yang dialami oleh banyak negara demokrasi baru menunjukan bahwa membentuk suatu negara demokrasi merupakan suatu hal yang sulit, dan hal lainnya, yang sering kali lebih sulit adalah tugas mempertahankanya, serta memberikan vitalitas dan makna kepadanya.¹⁴

Gerakan demokratisasi di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim juga terjadi di Indonesia, khususnya yang dipelopori oleh M. Amien Rais. M. Amien Rais adalah salah satu tokoh politik terkemuka di Indonesia saat ini, di samping KH. Abdurrahman wahid dan lain-lain. M. Amien Rais namanya mulai melambung sebagai seorang “*pendekar demokrasi*” dan seorang “*kratikus politik*” ketika melontarkan gagasan “*suksesi nasional*”

¹³Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 21.

¹⁴Larry Diamond, *The Democratic Revolution*, Diterjemahkan Oleh Matheos Nalle, *Revolusi Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 22.

kepemimpinan Presiden Soeharto pada sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya tahun 1983. Setelah itu gagasannya yang cukup menggelitik dan membuat “gerah” pemerintah pada waktu itu, karena cukup sering di lontarkan hingga pada akhirnya digelindingkan bola reformasi ke tengah-tengah gelanggang politik Indonesia yang di sambut antusias oleh hampir seluruh lapisan dan elemen masyarakat Indonesia.¹⁵

Menurut pemikiran M. Amien Rais, mayoritas bangsa Indonesia yang memeluk Agama Islam pasti memilih sistem politik yang dinamakan demokrasi. Sebab, sistem ini yang paling indah, baik, bahkan mampu menghindari adanya tirani mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya. Dalam konteks konstitusi Indonesia, menurut M. Amien Rais, soal demokrasi ini telah terkandung di dalam UUD 1945. Persoalannya adalah, antara teori yang mengatakan “melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen” ternyata bertabrakan dengan praktiknya yang tidak konsekuen dan penuh distorsi. M. Amien Rais memberikan penegasan bahwa demokrasi tidak hanya cocok untuk orang barat, untuk Indonesia pun merupakan yang paling baik.

Kegamangan yang M. Amien Rais rasakan bukan pada konstitusi Indonesia, yang antara lain memuat soal demokrasi, tetapi pada dataran pelaksanaan atau praktik politik yang berjalan dimasa pemerintahan orde baru pada saat itu. Karena itu M. Amien Rais menekankan pentingnya tiga hal untuk diperhatikan dalam rangka membangun demokrasi yang sebenarnya,

¹⁵Muhammad Najib dan Kuat S, *Op.Cit.*, h. 17.

yaitu pendidikan politik bagi rakyat. Ini dilakukan agar rakyat berani menyatakan pendapat, sekalipun berbeda dengan penguasa. Kemudian pihak penguasa perlu diyakinkan bahwa untuk mendapatkan legitimasi atau keabsahan yang kuat, mereka perlu didukung rakyat, tetapi bukan dengan cara menakut-nakuti atau menekan rakyat, melainkan dengan memberi kepercayaan kepada rakyat.¹⁶

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah Agama yang memuat tentang nilai-nilai dasar demokrasi seperti nilai keadilan ('adalah), persamaan (*musawwah*), musyawarah (*musyawarah*), kemerdekaan (*hurriyah*), perdamaian dan kesejahteraan. Kesemuanya diinformasikan oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 159.



فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Al-Imran:159).¹⁷

¹⁶*Ibid.*, h. 152.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah* (Surakarta: Al-Karim, 2009), h.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan, mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan, apabila telah tercapai suatu kesepakatan, maka setiap pihak harus menerima dan bertawakal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah, dan Allah mencintai hambanya yang bertawakal.

Adanya pemikiran-pemikiran yang bernuansa Islam dalam berdemokrasi dengan menerapkan metode-metode hukum yang dapat difungsikan untuk menjawab berbagai masalah. Seperti halnya dengan Pemikiran M. Amien Rais untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan berdemokrasi.

Oleh sebab itu penulis menyajikan dalam skripsi ini dengan maksud memberikan gambaran secara detail dan jelas berkenaan dengan pemikiran politik M. Amien Rais tentang Demokrasi di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat merumuskan inti permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu :

1. Bagaimana pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia perspektif fiqh siyasah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara mendalam pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia dan kiprahnya dalam bidang politik di dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Untuk mengetahui pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁸ Dan membahas dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan.

Data diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan pembahasan skripsi ini dan literatur lainnya yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan dikaji.

¹⁸Joko Suvbagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), h. 2.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁹ Sedangkan analisis yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang kemudian melakukan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data.²⁰

Berdasarkan jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan deskriptif analisis yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi (gambaran), gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada yang kemudian melakukan uraian dasar dan melakukan pemahaman, penafsiran dan interpretasi data, pola pemikiran politik M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia perspektif fiqh siyasah.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah koleksi data-data atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²¹

¹⁹Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h. 58

²⁰*Ibid.*, h. 68.

²¹Suharsimi Ariitkumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi IV) (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

Data ini termasuk data sekunder, karena sumber data pada penelitian perpustakaan pada umumnya bersumber pada data sekunder artinya bahwa penelitian memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan. Yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang bersumber pada buku-buku pokok, Al-Qur'an, Hadist.
- b. Bahan hukum sekunder yang bersumber pada buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yang bersumber pada kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah riset kepustakaan, yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data yang terdapat diruangan perpustakaan. Dengan kata lain teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data yang bersumber dari data primer (Al-Qur'an, Hadist), sekunder (buku, majalah, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini), maupun tersier (kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini). Pada tahap pengumpulan data ini, analisis telah dilakukan untuk meringkas data, tetapi tetap sesuai dengan kajian dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif, membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

4. Pengelolah Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen yang relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas, dan tampak kesalahan.
- b. Sistem data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan kemudian hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus.²²

²²Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004), h. 127.

BAB II DEMOKRASI DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pengertian Demokrasi

1. Pengertian Umum “Demokrasi”

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.²³ Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.²⁴

Pemerintahan oleh rakyat yang dimaksudkan di sini adalah oleh wakil-wakil rakyat terbaik yang dipilih secara bebas dalam kesamaan hak pilih politik yang diproses secara yuridis. Jadi, kebebasan dan kesamaan dalam memilih *the best rulers* atau calon pemerintah yang dianggap terbaik, yang benar-benar dapat mempresentasikan dan mewujudkan kehendak rakyat mayoritas, sehingga rakyat merasa dirinya sendirilah yang memerintah karena seluruh aspirasinya dapat terpenuhi atau paling tidak terpahami sebagai kebenaran sikap oleh mayoritas maupun minoritas

²³A. Ubaidillah, *Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Edisi Revisi II) (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 131.

²⁴Frans Bona Sihombing, *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-nilai Politik* (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 21.

dari rakyat. *Ide for the people* atau untuk seluruh rakyat, adalah ide untuk menyatakan tujuan ahir dari demokrasi yang ditata melalui proses “dari rakyat dan oleh rakyat” itu. “untuk rakyat” adalah tujuan atau skala keberhasilan yang dapat menjadi ukuran bagi wakil terpilih yang menjadi penguasa itu dalam menjalankan amanat kehendak rakyat. Bila “untuk rakyat” ini tidak terwujud, rakyat berhak mengantikannya dengan pilihan wakil yang lebih baik dan lebih memiliki moral dan skil yang cukup untuk mewujudkan kehendak rakyat tersebut. Kehendak rakyat yang dimanifestasikan dalam bentuk program-program pemerintah “untuk rakyat” itu menjadi tekanan untuk melihat titik keberhasilan suatu rezim pemerintahan yang berlangsung.

Adapun secara umum demokrasi adalah suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Dengan kata lain suatu pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang di ambil oleh mereka yang diberi wewenang.²⁵

Sedangkan menurut istilah demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.²⁶

²⁵ *Ibid.*, h. 22.

²⁶ Abdul Ghofur, *Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 12.

Ide demokrasi dalam perkembangan peradaban politik umat manusia adalah suatu prinsip etika yang digunakan dalam bidang politik pemerintahan. Jadi, demokrasi itu sendiri di anggap mengandung napas substansi etik inheren di dalamnya, sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita memilih untuk menganut teori politik demokrasi, pada dasarnya kita telah memilih suatu kaidah sistemik dari etika tertentu, yaitu etika demokrasi atau ajaran moral demokrasi. Demokrasi bermuatan etis karena adanya rasionalitas pertanggung jawaban atas kekuasaan rakyat yang diberikan kepada wakil atau pemimpin yang dipilih secara bebas. Demokrasi bermuatan etis juga tidak direstui cara pemaksaan untuk tunduk pada kekuasaan yang tidak disetujuinya. Demokrasi bermuatan etis karena mengakui kesamaan hak sebagai warga suatu polis (negara kota) atau dalam suatu *nation-state* (negara).²⁷

Secara logis juga dapat di pahami lebih jauh, demokrasi atau tidaknya sistem pemerintahan negara diukur dari selaras tidaknya kebijakan pemerintahan dengan kehendak atau kepentingan rakyat agar terukur dengan suara mayoritas atau kesepakatan perwakilan.

Hendri B. Mayo juga menyatakan demokrasi adalah sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan

²⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 82.

berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁸

Demokrasi mengandung tiga fenomena, yaitu fenomena politik (kekuasaan), fenomena etika (ajaran moral), dan fenomena hukum, yang saling berjaln kelindan membentuk teori ini dengan pendasaran teoritis yang tegas-tegas menolak tatanan kekuasaan (politik) yang otoriter dan totaliter. Ketiga prinsip eksistensial tersebut menjadi dasar dari semangat (*spirit*) dan pelembagaan (*institusionalisasi*) yang diukur lewat *majority principle* dan dijamin lewat perangkat hukum (hukum positif) oleh kaum positivis, yang akhirnya menjadi keabsahan (legitimasi) kendali kekuasaan yang senantiasa dapat dikontrol oleh rakyat secara efektif.²⁹

Dari seluruh pemahaman di atas, dengan didasari oleh prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip eksistensial yang dikandung dalam terminologi “demokrasi”, kita akan dapat menarik pengertian umum dari demokrasi itu. Dalam ragam pendapat dan uraian yang dilontarkan oleh berbagai pakar mengenai demokrasi, dapat kita klasifikasi adanya esensi yang merupakan benang merah dari konsep demokrasi itu. Klasifikasi pertama yang dapat kita pahami adalah bahwa demokrasi dapat dimasukan kedalam konteks negara maupun yang bukan dalam konteks negara. Selanjutnya klasifikasi kedua, demokrasi yang dicerna sebagai ide atau semangat (*spirit*) yang membawa nilai-nilai pandangan hidup, *way of life*

²⁸Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2003), h. 19.

²⁹Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 71.

atau *weltanschauung*, dan yang bukan hanya sebagai semangat tetapi sebagai proses pelebagaan tatanan kekuasaan yang rasional, dan efektif dikontrol oleh rakyat.

Dalam konteks negara baik semangat (*spirit and idea*) maupun pelebagaan (*institutionalization*) kekuasaan rakyat, keduanya dilatarbelakangi oleh ide-ide bawaan yang merupakan nilai eksistensial berupa paham tentang kebebasan dan kesamaan (dengan seluruh derivatifnya) yang diimplementasikan lewat proses pengukuran suara mayoritas sebagai manifestasi dari aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Semuanya ini ditata di dalam suatu kerangka sistem hukum yang juga merupakan hasil dari kehendak rakyat mayoritas itu sendiri. Jadi, demokrasi selalu mengandalkan adanya sistem hukum atau secara sederhana adalah adanya ketentuan yang menjadi aturan main yang mengikat semua partisipan.³⁰

Demokrasi merupakan suatu ide tentang tatanan politik. Lebih fokusnya adalah konsep kekuasaan yang di dasarkan atas kehendak rakyat, sehingga demokrasi adalah bagian dari perbincangan besar ilmu politik, filsafat politik dan etika sosial (tentunya pula masuk kedalam bahasa etika politik). Dalam hal ini kita dapat memasukan demokrasi dalam kategori “fenomena kekuasaan”. Demokrasi merupakan konsep atau perangkat kekuasaan “struktur” yang dimasukan sebagai penghayatan, tatanan, dan pengelolaan bernegara yang dikehendaki dan disetujui oleh rakyat melalui

³⁰*Ibid.*, h. 83.

suara mayoritas.³¹ Jadi, demokrasi hanyalah salah satu fenomena pengelolaan kekuasaan dalam suatu institusi negara yang menempatkan suara rakyat mayoritas yang bebas dan kesamaan hak menjadi penentu. Demokrasi kemudian dapat ditegaskan sebagai salah satu bentuk pemerintahan negara disamping bentuk-bentuk lain yang pernah kita kenal, seperti Monarki, Aristokrasi, Oligarki. Dalam derivasi dan variasi “kekuasaan rakyat”nya yang berbeda-beda pada berbagai negara dan berbagai kurun waktu sejarah.

Hal yang paling signifikan dalam demokrasi adalah sebagai fenomena kekuasaan yang mencoba mengintrodusir substansi etis (fenomena moralitas) kedalam lingkup teoretiknya, agar legitimasinya meluas tidak hanya pada legitimasi sosiologi (melalui prinsip mayoritas) melainkan juga mencapai legitimasi etis. Dengan kata lain demokrasi ingin mengawinkan (konvergensi) antara fenomena kekuasaan (politik) dengan fenomena moral (etika). Wajah kekuasaan yang beringas dilembutkan dengan memasukan substansi etis sebagai pemantas dan pembenaran atas kegiatan kekuasaan. Dari pemahaman tersebut dapat dilihat bahwa fenomena politik sering kali lebih kuat daripada fenomena moralitas. Hal ini dapat dicermati bahwa demokrasi lebih dikenal sebagai teori politik ketimbang sebagai teori etika.³²

³¹Hendra Nurtjahjo, *Op.Cit.*, h. 86.

³²Riza Noer Arfani, *Op.Cit.*, h. 58.

Jika dikontekskan dengan konvergensi, maka demokrasi itu mengandung fenomena politik dan fenomena moralitas sekaligus. Idealnya demokrasi hendak berada sebagai irisan (*intersection*) dari fenomena kekuasaan dan etika tersebut. Namun dengan demikian dalam kenyataannya, seringkali fenomena kekuasaan dimainkan dan mengalahkan restriksi dari fenomena moralitas atau etika itu. Fenomena etika menjadi lebih kecil dan berada dalam lingkup kekuasaan politik yang dominan. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya kepincangan penyelenggaraan politik, karena politik cenderung mengabaikan etika dalam pencapaian tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingannya yang notabene adalah kepentingan-kepentingan elitis yang bersembunyi di balik suara orang banyak (atas nama rakyat mayoritas).

Ciri-ciri khas demokrasi adalah kekuasaan yang terpusat kepada rakyat, konteks modern menyebabkan kekuasaan ini ditransformasi terpusat pada dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan inilah yang akan mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat dan menunjukkan efektif tidaknya kendali putusan atas nama rakyat itu. Dalam dimensi pluralis, kekuasaan tertinggi itu tidak ada di satu badan, kedaulatan atau kekuasaan itu tersebar dalam berbagai lembaga negara yang saling *check and balances*. Pemilihan umum menjadi signifikan untuk membentuk suatu dewan yang dipercayai, *accountable*, dan memiliki kemampuan sebagai mana yang dipersepsi oleh pemilih (rakyat/konstituen). Hal yang juga penting untuk diingat di sini adalah bahwa seluruh proses ini berada dalam

lingkup yuridis, ada *rule of the game* yang telah disepakati bersama (melalui metode demokrasi) yang menjadi dasar legal (legalitas) dari keputusan dan tindakan politik yang ada.³³

Tujuan Demokrasi yaitu Suatu sistem menganut paham demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dewasa melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui undang-undang yang dijalankan secara adil.³⁴

Abraham Lincoln menguraikan pengertian “kekuasaan rakyat itu kedalam slogan yang sangat ringkas, yaitu “*from the people, by the people, and for the people*”, yang kesemuanya itu berintikan ide “*fule by the peolpe*”. Jika kita merenungi kata “dari rakyat” maka ini akan menunjuk suatu pemilihan umum yang bebas atau kebebasan memilih yang dimiliki secara sama (kesamaan) oleh seluruh rakyat sebagai partisipan kehidupan politin (*zoon politicon*). Jadi, apa yang diharapkan oleh demokrasi dalam hal ini adalah pemilihan bebas untuk mencari seluruh orang yang duduk dalam tatanan kekuasaan politik pemerintahan negara. Proses politik lainnya diluar “pemilihan yang bebas” tidak semestinya diterapkan kecuali bersandar dari proses dan hasil dari pemilihan bebas itu sendiri.

³³Hendra Nuertjahjo, *Op.Cit.*, h. 89.

³⁴Budi Suryadi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2007), h. 102.

Proses seperti penunjukan atau pengangkatan bukanlah hal yang ideal bagi demokrasi, namun bukan pula suatu yang tidak mungkin dalam demokrasi perwakilan. Para wakil yang arif-bijaksana hasil dari proses pemilihan dapat melakukan penunjukan atau pengangkatan bila hal tersebut dinyatakan boleh secara yuridis oleh suara mayoritas rakyat.

Walaupun sering dikritik sebagai bukan bagian dari ide demokratis, tak jarang pula ide pengangkatan dan penunjukan bisa jadi menghasilkan pemimpin dan pemerintahan yang adil dan berwibawa. Bahkan di Eropa dan Skandinavia praktek demokrasi dalam suatu monarki (pemerintahan kerajaan) lebih terasa demokratis ketimbang negara-negara yang langsung menyebut dirinya sebagai pemerintahan demokrasi (*constitutional government*).

2. Konsep Kekuasaan dan Konsep Moralitas (Etika)

Sebelum masuk dalam pengertian filosofik, penulis perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu adanya perbedaan dan keterpilahan dari konsep kekuasaan dan konsep moralitas (dalam hal ini etika). Hal ini penting untuk melihat secara lebih dalam dan meluas (filosofis) tentang hakikat demokrasi sebagai sebuah teori politik yang menjadi basis bagi etika politik modern.

Aristoteles menyatakan bahwa berpolitik adalah ungkapan beretika. Tanpa dimensi politik, manusia belum dapat tampak sebagai manusia. Negara adalah suatu yang positif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai *zoon politicon* (mahluk yang berpolitik). Hal ini ditempuh

untuk mencapai kebijaksanaan melalui pengalaman, yaitu hidup yang baik, yang membawa pada kebahagiaan (*eudamonia*). Kalaulah berpolitik itu sebagai ungkapan hidup beretika berarti dalam istilah “politik” itu sendiri sudah inheren ada etika. Artinya, politik itu pastilah etis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa aristoteles memahami politik tidak bisa dilepaskan dari etika, atau kekuasaan tidak bisa dilepaskan melalui moralitas.

Lain halnya dengan Hannah Arendt mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu yang terlepas dari kekerasan. Konsep kekuasaan Arendt memahami kekuasaan bukan sebagai alat untuk memaksa orang lain melaksanakan tujuan seseorang, melainkan sebagai pembentukan kehendak bersama dalam suatu komunikasi yang diarahkan pada saling memahami. Hal ini berlawanan dengan Weber yang menganggap bahwa kekuasaan dan kekerasan bagaikan sebuah mata uang yang berkeping dua. Kekuasaan dianggap sebagai bentuk yang tersembunyi dari kekerasan dan kekerasan dianggap sebagai manifestasi kekuasaan yang paling mencolok.³⁵ Arendt ingin menyangkal pendapat ini dan menyangkal seolah-olah dari kekerasan bisa muncul kekuasaan dan sebaliknya dari kekuasaan bisa muncul kekerasan.³⁶

Jika kita beranggapan secara sederhana bahwa kekerasan adalah sesuatu yang tidak bermoral, dapat disimpulkan bahwa Arendt menginginkan adanya pengertian kekuasaan yang tidak mungkin terlepas dari moral. Hal-hal yang tidak bermoral semacam kekerasan dengan segala

³⁵*Ibid.*, h. 43.

³⁶*Ibid.*, h. 53.

bentuk pemaksaan kehendak lainnya tidak boleh dilekatkan dan dipahami inheren ada dalam konsep kekuasaan.

Para sosiolog umumnya mengambil titik tolak yang netral dalam menelaah kekuasaan, artinya tidak akan menilai kekuasaan sebagai hal yang baik atau buruk, kecuali dari sudut pelaksanaannya. Karakteristik pokok hubungan kekuasaan (secara sosiologis), yang paling sering dijumpai ada dua ciri. Oleh karena unsur tekanan atau konflik terwujud pada penggunaan sangsi negatif, maka kekuasaan dapat dirumuskan sebagai hubungan prosedural antara dua pihak yang terutama bercirikan: (1) pengaruh asimetris, dengan kemungkinan pengambilan keputusan ada pada salah satu pihak, walaupun pihak lain menentangnya. (2) penggunaan sangsi-sangsi negatif sebagai perilaku menojol dari pihak yang dominan. Jika dihubungkan dengan kekerasan, sangsi negatif itu dapat berwujud kekerasan dan hal ini potensial dalam suatu relasi kekuasaan.

Sementara itu Michel Foucault memahami kekuasaan secara luas. Kekuasaan menurut Foucault bukan sesuatu yang dapat dipertukarkan, diberikan, tetapi dilaksanakan. Kekuasaan hanya ada dalam pelaksanaan dimana yang terpenting adalah suatu hubungan kekuatan. Hubungan yang mengandung niat seseorang untuk mengarahkan perilaku orang lain.³⁷ Dalam imajinasi Foucault, kekuasaan adalah hubungan-hubungan yang amat kompleks dari kekuatan-kekuatan yang terus berubah dan menyebar keseluruh bidang kemasyarakatan. Kekuasaan juga beraksi melalui unsur-

³⁷Agung Bambang, *Michael Foucault Tentang Kekuasaan* (Majalah Filsafat Driyarkara Thn. XII No. 2 1996), h. 32-33.

unsur terkecil, misalkan keluarga, hubungan seksual, tetapi juga hubungan permukiman, perkampungan dan sebagainya. Selama kita berada dan masuk dalam jaringan kehidupan sosial, kita akan selalu menemukan kekuasaan sebagai sesuatu yang mengalir di dalamnya, yang beraksi, yang menimbulkan efek-efek.³⁸

Konsep kekuasaan menurut pemahaman Foulcoute ini amat menarik, kekuasaan dapat eksis dan beraksi “di mana saja dan kapan saja” seperti iklan *coca cola*. Hal lain yang menarik dari Foulcoute adalah bahwa ia menyatakan bahwa “di mana ada kekuasaan disitu ada perlawanan” akibatnya, perlawanan ini tidak dalam posisi eksterioritas dalam hubungan dengan kekuasaan, kekuasaan selalu mengandalkan adanya perlawanan.³⁹ Kalau demikian halnya, dapat dipersepsi bahwa kekuasaan selalu mengandung unsur-unsur negatif untuk dilawan. Secara luas dapat ditafsirkan bahwa mungkin sekali kekuasaan itu mengandung benih-benih amoral (termasuk kekerasan). Dengan demikian, kekuasaan dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat memuat moralitas dan dapat pula tidak memuat moralitas. Kekuasaan dapat dipilih dan dipisahkan dari moralitas.

Penegasan yang amat sangat mengenai keterpisahan kekuasaan dan moralitas dikemukakan secara eksplisit oleh Machiavelli. Bahkan Machiavelli menganggap bahwa kekuasaan dan moralitas adalah suatu yang sangat amat berbeda dan tidak bisa disatukan. Bagi Machiavelli tidak

³⁸*Ibid.*, h. 39.

³⁹*Ibid.*, h. 38.

ada gunanya untuk membicarakan legitimasi moral (etis) bagi kekuasaan politik demi “efektifitas” dari kekuasaan itu sendiri. Sehingga, negara tidak perlu dibebani pandangan-pandangan moral dalam praktek-praktek kekuasaannya.⁴⁰

Memang benar juga bahwa kekuasaan politik merupakan sebagian dari kekuasaan sosial, tidaklah mungkin dapat dijalankan dengan baik tanpa menggunakan “kekuasaan” atau “sifat memaksa” secara fisik seperlunya. Namun sifat memaksa ini bagaimanapun juga harus legitim. Machiavelli menolak pemahaman mengenai kekuasaan yang “benar” itu, ia merendahkan martabat dimensi kehidupan politik pada persaingan antara para pemimpin “mafia” yang saling berebut kekuasaan. Tentu saja, ini merupakan konsep kekuasaan yang tidak terhormat. Di sini ia mereduksi paham kekuasaan pada tingkat yang paling rendah.⁴¹

Dapat dipahami secara teoritis logis bahwa kekuasaan secara potensial dapat terpisah secara total dari moralitas (etika), dan secara potensial dapat pula menyatu secara total dengan moralitas (etika), sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan moralitas adalah dua hal yang berbeda, dalam arti dapat dipilih (*critein*). Namun sering kali dalam kenyataan empiris, kedua ekstrem itu tidak dapat terlihat dengan jelas, yang lebih tampak adalah tarik ulur kekuasaan dengan moralitas dalam mengaktualkan masing-masing kepentingan yang bersandar pada

⁴⁰Dewanto Tarcisius, *Pemisahan Moral dan Kekuasaan* (Jakarta: PT, Bumi Askara, 2006), h. 27-30.

⁴¹*Ibid.*, h. 68.

masing-masing keyakinan tertentu (*ideologis*) dari partisipasi kehidupan politik yang ada.

B. Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam konteks inilah konsep teoritis demokrasi menawarkan prinsip-prinsip umum dalam menjalankan pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang senantiasa dalam kontrol dan partisipasi rakyat yang penuh. Diawali dengan pertumbuhan nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat, dan disertai dengan tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi semisal trias politika, maka sistem politik yang berdasarkan teori demokrasi akan terwujud dalam kenyataan pemerintahan yang efektif.⁴²

Dibawah ini akan diuraikan beberapa pendapat yang mengutarakan prinsip-prinsip umum yang diturunkan dari teori demokrasi. William Ebenstein menyebutkan ada delapan ciri utama dari konsep demokrasi barat, yakni (1) empirisme rasional, (2) penekanan pada individu, (3) negara sebagai alat, (4) kesukarelaan (*voluntarism*), (5) hukum di atas hukum, (6) penekanan pada cara prosedural, (7) persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antarmanusia, dan (8) persamaan semua manusia. Bernhard Sutor menyebutkan bahwa demokrasi memiliki tanda-tanda empiris, yaitu jaminan terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat, memperoleh informasi bebas, kebebasan pers, berserikat dan berkoalisi, berkumpul dan berdemonstrasi, mendirikan partai-partai, berposisi, lalu pemilihan yang

⁴²Ruf Maswadi, *Otoritas dan Demokrasi* (Jakarta: PT Rajawali, 1999), h. 17.

bebas, sama, rahasia, atas dasar minimal dua alternatif, dimana para wakil dipilih untuk waktu terbatas.⁴³

Juan J. Linz dan Alfred Stepan juga membuat kriteria pokok mengenai demokrasi yaitu kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, dimasukannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apapun pilihan politik mereka secara praktis, ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apapun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian demokrasi memang memiliki konotasi yang luas dan bervariasi hingga kita sangat sulit untuk menyusun sebuah definisi yang konkret dan dapat diterima secara universal. Menurut Woodrow Wilson, demokrasi akan menghilangkan lembaga-lembaga tiran yang ada dimasa lalu, dan menawarkan di dalamnya kekuatan imperatif (keharusan) pemikiran populer (umum/khalayak) dan lembaga-lembaga konkret suatu perwakilan populer, dan mereka menjanjikan untuk mereduksi (menyederhanakan) politik menjadi suatu bentuk tunggal dengan menggantikan seluruh lembaga

⁴³Hendra Nurtjahjo, *Op.Cit.*, h. 45.

dan kekuatan memerintah lainnya dengan sebuah perwakilan yang demokratis.⁴⁴

Dalam bentuk yang ideal, doktrin demokrasi tersebut menyuarakan kebebasan dan kesamaan untuk seluruh warga dari sebuah negara-negara untuk menyusun kehidupan politik dan ekonomi sesuai dengan kemampuan mereka. Doktrin ini menjamin kebebasan berfikir, berbicara, dan berkumpul sehingga tidak ada halangan apa pun bagi pengembangan sepenuhnya kemampuan manusia. Demokrasi dikagumi sebagai obat efektif melawan despotisme (kekuasaan tiran) yang merupakan hal lumrah bagi lembaga-lembaga politik masa lalu, seperti Monarki, Aristokrasi, dan Oligarki.⁴⁵

Reinhold Zippelius menegaskan bahwa pemilihan umum harus dengan efektif menentukan siapa yang memimpin negara dan arah kebijakan apa yang mereka ambil, serta bahwa dalam demokrasi, pendapat umum memainkan peranan penting. Jack Lively menyebut tiga kriteria kadar demokratisasi sebuah negara: (1) sejauh mana semua kelompok utama terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan, (2) sejauh mana keputusan pemerintah berada di bawah kontrol masyarakat, (3) sejauh mana warga negara biasa terlibat dalam administrasi umum. Henry B. Mayo mencatat ada paling tidak sembilan nilai yang mendasari demokrasi, yaitu: (1) menyelesaikan perselisihan dengan damai dan sukarela, (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, (3) menyalenggarakan pergantian pemimpin secara teratur,

⁴⁴*Ibid.*, h. 48.

⁴⁵Riza Noer Arfani, *Op.Cit.*, h. 123.

(4) membatasi pemakaian kekerasan secara minimum, (5) adanya keanekaragaman (*prurality*), (6) tercapainya keadilan, (7) yang paling baik dalam memajukan ilmu pengetahuan, (8) kebebasan, dan (9) adanya nilai-nilai yang dihasilkan oleh kelemahan sistem yang lain. menanggapi ragam perumusan mengenai demokrasi, Miriam Budardjo dalam pidato peanugrahan Gelar Doctor Honoris Causa dalam ilmu politik di Universitas Indonesia, menyebutkan salah satu unsur terpenting dari semua definisi demokrasi ialah *accountability*, atau dengan kata lain *accountability* merupakan suatu *core value* dari demokrasi. *Accountability* adalah pertanggung jawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat itu. Dalam teori politik tradisional, rakyatlah yang memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Ini dinamakan kedaulatan rakyat.⁴⁶

Untuk melengkapi berbagai ciri dan pengertian demokrasi, patut dikutip sebuah definisi yang dibuat oleh Samuel Huntington. Menurutnya, sebuah sistem politik disebut demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. Definisi ini ternyata memberikan ciri-ciri demokrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan yang sebelumnya karena hanya menekankan pada

⁴⁶Hendra Nuertjahjo, *Op.Cit.*, h. 50.

pemilu yang adil, jujur, berkala, dan kompetitif serta adanya hak pilih bagi rakyat.

Sementara itu, Franz-Magnis Suneno langsung memasang demokrasi dalam konteks negara, yaitu negara demokratis. Magnis menyebutkan bahwa ada lima ciri-ciri hakiki negara demokrasi, yaitu: (1) negara hukum, (2) pemerintahan yang di bawah kontrol nyata masyarakat, (3) pemilihan umum yang bebas, (4) prinsip mayoritas, (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi. Dalam hal ini Magnis menegaskan bahwa suatu negara hukum tidak mesti demokratis. Pemerintahan monarkis atau paternalistik pun dapat taat kepada hukum. Tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya. Dengan kata lain sebenarnya magnis ingin menyatakan bahwa demokrasi harus dijalankan melalui suatu konstruksi negara yang berdasarkan atas hukum.

Dari ragam pendapat mengenai nilai-nilai yang terkandung dari teori demokrasi masing-masing pakar tersebut, dapat disimpulkan dalam beberapa hal, yaitu: (1) adanya nilai-nilai yang bersifat substansial, (2) adanya nilai-nilai yang bersifat instrumental (*prosedural*) yang menjadi mekanisme penentu agar persetujuan menjadi absah. Kedua kategori nilai tersebut, baik substansial maupun prosedural, sama pentingnya dalam eksistensi suatu tatanan teoretis yang disebut sebagai demokrasi. Tanpa adanya nilai atau prinsip tersebut, demokrasi tidak mungkin ada.

Muhammad A,S. Hikam dalam buku “politik kewarganegaraan” menyebut tentang prinsip-prinsip dasar demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut yang terpenting adalah (1) kedaulatan berada di tangan rakyat, (2) jaminan hak-hak dasar warga negara, (3) sistem perwakilan, (4) partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, (5) persamaan di depan hukum bagi warga negara, (6) rul of law, (7) pertanggung jawaban penguasa kepada warga negara.⁴⁷

Setiap penyelenggara ketatanegaraan yang gagal memenuhi berarti kehilangan legitimasinya, baik legitimasi yuridis, politis maupun etis. Rezim-rezim yang berkuasa di republik ini, dengan demikian mesti diukur kesuksesannya dan kegagalannya didalam melaksanakan praktek ketatanegaraan dengan prameter yang ditetapkan seperti itu. Oleh karena itu, struktur dan format politik yang dikembangkan didalam masyarakat harus secara konsisten mengutamakan prinsip-prinsip tersebut. Jika tidak, maka sudah pasti bahwa praktek ketatanegaraan yang akan dimunculkan tidak mungkin bisa mengklaim sebagai demokrasi, baik secara prosedural apalagi secara substantif.

Dalam kaidah-kaidah hukum Islam banyak ditemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan negara dan sistem pemerintahanya, seperti prinsip musyawarah, pertanggung jawab dengan pemerintah, kewajiban taat kepada penguasa, perdamaian dan perjanjian antara ummat Islam dengan golongan

⁴⁷Muhammad A,S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 126.

lain, dan sebagainya. Dalam Islam dijelaskan tentang prinsip-prinsip politik pemerintah, antara lain:

1. Prinsip Kepemimpinan sebagai amanah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat, (An-nisa:58).*⁴⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diwajibkan menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil. Perkataan amanah yang secara leksikal berarti “tenang dan tidak takut”. Jika kata tersebut dijadikan kata sifat, maka ia mengandung pengertian “segala sesuatu yang dipercayakan seseorang kepada orang lain dengan rasa aman”. Dengan demikian jika perkataan amanah dibawa dalam konteks kekuasaan negara, maka perkataan tersebut dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT.

⁴⁸J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 5.

2. Prinsip Musyawarah

Dalam Al-Qur'an ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar dalam Islam. Ayat pertama terdapat dalam surah Asy-Syuura.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka (Asy-Syuura: 38).⁴⁹

Sedangkan surah yang kedua terdapat pada surah Ali-Imran.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (Ali-Imran:159).⁵⁰

⁴⁹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 126.

⁵⁰*Ibid.*, h. 127.

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum, Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua menekankan perlunya diadakan musyawarah atau lebih tegasnya umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan. Kewajiban ini terutama dibebankan kepada setiap penyelenggara kekuasaan negara dalam melaksanakan kekuasaannya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara.⁵¹

3. Prinsip Keadilan

Perkataan keadilan sama dengan musyawarah yang bersumber dari Al-Qur'an. Cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan tentang keadilan, di antaranya terdapat dalam surah *al-Nisaa*.

⁵¹J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h. 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوِ
ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا
ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْرَأَ ءَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan An-Nisaa: 135).⁵²

Dari ayat tersebut di atas sekurang-kurangnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Orang-orang yang beriman wajib menegakkan keadilan.
- Setiap mukmin apabila ia menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-juurnya dan adil..
- Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu.
- Manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam Alquran. Oleh karena itu Allah sendiri memiliki sifat Maha Adil. Keadilan-Nya penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-Nya (rahman dan rahim). Dalam Islam, keadilan adalah kebenaran. Kebenaran adalah merupakan salah satu nama Allah SWT. Allah SWT adalah sumber

⁵²Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h. 124.

kebenaran yang di dalam Al-Qur'an disebut Al-Haq. Oleh karena itu, Al-Syaukani, sebagaimana yang dikutip Abd. Muin Salim, menyatakan bahwa keadilan adalah menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan pikiran.

Apabila prinsip keadilan dibawa ke fungsi kekuasaan negara, maka ada tiga kewajiban pokok bagi penyelenggara negara atau suatu pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan, yaitu:

- a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara yang adil, jujur, dan bijaksana.
- b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman yang seadil-adilnya.
- c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah keridhaan Allah.⁵³

4. Prinsip Persamaan

Prinsip Persamaan dalam Islam dapat dipahami dari Al-Qur'an Surah *Al-Hujurat*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu*

⁵³J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h. 6.

*saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (Al-Hujurat:13).*⁵⁴

Ayat itu melukiskan bagaimana proses kejadian manusia. Allah telah menciptakannya dari pasangan laki-laki dan wanita. Pasangan yang pertama adalah Adam dan Hawa, kemudian dilanjutkan oleh pasangan-pasangan lainnya melalui suatu pernikahan atau keluarga. Jadi semua manusia melalui proses penciptaan yang “seragam” yang merupakan suatu kriterium bahwa dasarnya semua manusia adalah sama dan memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan.⁵⁵

5. Prinsip Perdamaian

Islam adalah agama perdamaian. Olehnya itu Al-Qur'an sangat menjunjung tinggi dan mengutamakan perdamaian sebagaimana yang termaksud dalam surah *al-Baqarah* (2): 208.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (al-Baqarah:208).*⁵⁶

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.125.

⁵⁵J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h. 8.

⁵⁶Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, h.25.

6. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukannya dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber-sumber dana tersebut antara lain adalah: zakat, sadaqah, hibah, dan wakaf. Mungkin juga dari pendapatan Negara seperti pajak, bea, dan lain-lain. Sehingga masyarakat dapat sejahtera dengan menggunakan prinsip ini sesuai dengan penempatannya.⁵⁷

C. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi yang merupakan pemerintahan oleh rakyat itu, adalah cermin dari suatu proses budaya dalam usaha menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Kebudayaan, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang di hadapkan kepadanya pada setiap tahap kemandapan perkembangan, memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu-waktu mengkaji kemandapan tersebut. Maka, apa yang disebut sebagai proses demokrasi adalah, suatu bagian dari proses kebudayaan, karena ia merupakan kekuatan yang menggerakkan proses pembentukan sosok baru dari suatu konsep

⁵⁷J. Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h. 14.

kekuasaan, yang di anggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat.

Walaupun pada dasarnya negara-negara yang menjalankan sistem demokrasi ini menyelenggarakan dengan jalan perwakilan, tetapi cara yang dipergunakan oleh masing-masing negara ternyata banyak berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya, walaupun tentu saja di sana-sini terdapat juga adanya kesamaanya. Adapun perbedaanya itupun tidak menunjukan kepada hal yang tertentu tetapi menunjuk kepada bermacam-macam soal. Artinya, di dalam hendak menyelenggarakan sistem demokrasi dengan jalan perwakilan ini masing-masing negara mempunyai cara sendiri-sendiri yang disesuaikan menurut kebutuhan serta keadaan daripada masing-masing negara itu sendiri.

Setidaknya, tuntutan demokratisasi beberapa wilayah Islam khususnya Indonesia itu di dorong oleh dua faktor berikut: *Pertama*, secara faktual di beberapa kawasan ini, utamanya yang menganut sistem politik sentralistik atau monarki, sistem politik yang ada cenderung represif dan bahkan korup. Pada saat yang sama pertumbuhan ekonomi berjalan lamban dan tingkat pengangguran semakin tinggi. Kenyataan ini tidak bisa tidak menimbulkan tuntutan baru, utamanya di kalangan muda yang ingin melihat negaranya lebih demokratis. *Kedua*, di beberapa kawasan Islam itu muncul kelas-kelas intelektual yang secara serius dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai demokrasi yang di anggap suatu keharusan bagi peradapan manusia. Kaum intelektual generasi baru itu tumbuh subur terutama di negara yang sistem

politiknya relatif memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengeluarkan pikiran dan pendapatnya.

Bagi Abdurrahman Wahid, landasan demokrasi adalah keadilan kemandirian untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Intinya demokrasi menuntut adanya keadilan dan mensyaratkan adanya otonomi setiap individu. Akan tetapi demokrasi tidak mengakui adanya kemutlakan, sebab pada dasarnya demokrasi merupakan proses tawar-menawar dan negosiasi secara terus menerus. Dengan demikian demokrasi selalu menyisahkan hal-hal yang masih bisa dinegosiasikan. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid berpendapat bahwa perjuangan menegakkan demokrasi tidak bisa dilakukan sekali saja, tapi butuh waktu yang panjang dan kesabaran yang tinggi disamping itu juga keseriusan.⁵⁸

Selanjutnya Abdurrahman Wahid menegaskan tentang demokrasi beliau mengatakan: “di negeri kita demokrasi belum lagi tegak dengan kokoh, masih lebih berupa hiasan luar bersifat kosmetik dari pada sikap yang melandasi pengaturan hidup yang sesungguhnya” jika tidak ada usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan demokrasi yang benar di negeri ini, tentu aspirasi-aspirasi itu akan terbendung oleh kekuatan-kekuatan anti demokrasi. Karenanya, dari sekarang sebenarnya telah dituntut diri kita untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang ada di negeri ini. Perjuangan itu haruslah dimulai dengan kesediaan menumbuhkan

⁵⁸Abdul Ghofur, *Demokratisasi Dan Prospek Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Gus Dur)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002), h. 6.

moralitas baru dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa teribat dengan penderitaan-penderitaan rakyat dibawah.⁵⁹

Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya sebagai demokrasi Soviet atau di Indonesia yang pada awal kemerdekaanya menggunakan istilah demokrasi terpimpin yang setelah itu pada masa “orde baru” berubah menjadi demokrasi pancasila dan pada masa reformasi sekarang masih banyak yang berpendapat bahwa demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi tanpa nama. Padahal istilah demokrasi menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau *government by the people* (kata yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa).⁶⁰ Dan dari penggunaan istilah demokrasi pada kedua Negara tersebut berdasarkan catatan sejarah yang telah ada, di dua Negara tersebut sama sekali tidak menunjukan keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah dan demokrasi hanyalah menjadi slogan pemerintah untuk menarik simpati rakyat saja.

Mengenai model sistem pemerintahan negara, ada empat macam sistem pemerintahan negara, yaitu: sistem pemerintahan diktator (diktator borjuis dan proleter), sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidentil, dan sistem pemerintahan campuran.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*, h. 93.

⁶⁰Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitus* (Jakarta: Fh UII Press, 2003), h. 140.

⁶¹Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 21.

Perbedaan itu dapat menunjukan kepada cara penunjukannya daripada wakil-wakil rakyat, dapat pula mengenai cara penyusunannya daripada badan perwakilannya, sehubungan antara badan perwakilan dengan badan-badan lainnya khususnya badan yang menyelenggarakan pemerintahannya, tugas dan wewenangnya dari pada badan-badan perwakilan dan lainnya. Semuanya itu menunjukan bahwa jarang sekali ketatanegaraan suatu negara sepenuhnya akan sama dengan ketatanegaraan yang lainya, walalupun dasarnya sama yaitu asas menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan oleh rakyat (demokrasi) dengan jalan perwakilan. Kesulitan yang dialami oleh banyak negara demokrasi baru menunjukan bahwa membentuk suatu negara demokrasi merupakan suatu hal yang sulit, dan hal lainnya, yang sering kali lebih sulit adalah tugas mempertahankannya, serta memberikan vitalitas dan makna kepadanya.⁶²

1. Sistem Demokrasi Indonesia

Ciri-ciri pokok demokrasi adalah: *Pertama*, berciri kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan berhak bersuara. Hak bersuara ada yang tidak bersifat langsung, seperti yang terdapat dinegara swis. Tetapi banyak pula yang melalui badan-badan perwakilan yang anggotanya dipilih rakyat (*representative democracy*). Indonesia memilih yang terakhir ini, seperti tersimpul dalam UUD 1945 “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. *Kedua*, berciri musyawarah untuk mufakat, bisa dengan

⁶²Larry Diamond, *The Democratic Revolution*, Diterjemahkan Oleh Matheos Nalle, *Revolusi Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), h. 22.

suara bulat (konsensus), bisa pula dengan suara terbanyak (*majority vote*). Tersimpul disini kesempatan mengungkapkan pikiran rakyat dan memperjuangkan aspirasinya. Untuk memungkinkan rakyat untuk mengungkapkan aspirasi dan pikiranya, dibutuhkan suasana keterbukaan. Keterbukaan untuk menerima informasi seluas mungkin bagi pengembangan aspirasinya. Keterbukaan dalam mengungkapkan pikiran dan keterbukaan dalam kesempatan mewujudkan prakarsa dan aspirasi masyarakat. *Ketiga*, berciri pemikulan tanggung jawab atas pikiran dan perbuatan diri (*accountability*). Orang harus memikul tanggung jawab atas ungkapan dan perbuatanya. Rasa tanggung jawab ini tumbuh tidak terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat, bangsa, negara dan Tuhan, sehingga kebebasan mengungkap bertidak dilaksanakanya dalam ruang lingkup rasa tanggung jawab yang luas tersebut.⁶³

Demokrasi yang ada di Indonesia, adalah demokrasi Pancasila; pelembagaanya mengikuti landasan konstitusional UUD 1945, pengembangan demokrasi harus menunjang proses pembangunan, begitu pula sebaliknya. Proses-proses demokrasi itu sendiri tidak terlepas dari berbagai masalah seperti ketidakpatuhan, proses dan lain-lain kegaduhan. Sebaliknya, demokrasi itu jarang sekali tidak stabil, dan kestabilan ini lebih terjamin justru dengan memantapkan demokrasi.⁶⁴ Sri Soemantri mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

⁶³Elza Perdi Taher (Ed), *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi* (Jakarta: Temprint, 1994), h. 156.

⁶⁴*Ibid.*, h. 160.

permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia dan keadilan sosial.⁶⁵

Jadi, apabila kita membedakan demokrasi Pancasila dengan demokrasi-demokrasi yang lain, maka secara fundamental perbedaan itu terletak pada predikat pancasilanya. Selain itu, demokrasi pancasila yang berlaku di Indonesia tidaklah mungkin dilaksanakan dengan hanya satu cara saja. Dengan kata lain, apa yang dirumuskan dan ditentukan dalam batang tubuh UUD 1945 bukanlah satu-satunya perwujudan atau implementasi daripada demokrasi pancasila.

2. Beberapa Prinsip Demokrasi Pancasila

Setiap demokrasi yang berkembang di setiap negara, pasti ada prinsip dasar yang menyertainya. Ada beberapa prinsip demokrasi pancasila yang berlaku dalam sistem politik pemerintahan Indonesia, antara lain:

a. Prinsip Persamaan

Dalam demokrasi pancasila, suatu sistem politik demokratis dengan sendirinya mencakup nilai persamaan. Dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradap, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajiban asasinya,

⁶⁵Sri Soemantri, *Demokrasi Pancasila* (Bandung: Sinar Grafika, 1998), h. 7.

tanpa membedakan suku, keturunan, jenis kelamin, agama dan sebagainya.

b. Keadilan Sosial

Konstitusi kita menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan. Diantara tiga komponen primer demokrasi yang terdiri dari kewargaan (*civil*), politik dan sosial, dalam satu segi, komponen “sosial” adalah hal yang paling fundamental.

c. Musyawarah

Melalui musyawarah maka akan terikat satu sama lain untuk mewujudkan tujuan bersama. Seperti dirumuskan dalam sila keempat dasar negara kita “hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Dengan demikian sistem politik pancasila harus benar-benar berkemampuan melaksanakan fungsi-fungsi penciptaan kehidupan politik yang sehat dan dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab politik warga negara, dan bergeraknya rakyat dalam proses politik. Semua fungsi tersebut harus diselenggarakan secara serasi dan sinergis tanpa harus menumbuhkan iritasi nasional, sehingga pendidikan politik dapat membangun kekuatan rakyat yang demokratis.

Faktor-faktor utama demokrasi itu ada enam yaitu: (1) format politik, (2) persamaan dan kebersamaan, (3) keterbukaan, (4) sistem politik

pluralistik, (5) clean government dan negara kekeluargaan, (6) budaya politik emansipatif, partisipatif dan terbuka.⁶⁶

D. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Demokrasi di Indonesia

Dalil-dalil syar'iyah yang di ambil daripadanya hukum-hukum syariah berpangkal dari empat pokok yaitu: Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Jadi apabila terjadi suatu kejadian maka pertama kali harus di cari hukumnya di dalam Al-Qur'an, bila telah ditemukan hukum di dalamnya maka harus dilaksanakan hukum itu. Apabila tidak ada disana, maka harus melihat Al-Sunnah, bila telah ditemukan hukum di dalamnya maka harus dilaksanakan hukum itu. Termasuk juga Al-Ijma dan Al-Qiyas.⁶⁷

Di Indonesia sebagai negara hukum, pemerintahan dan rakyatnya bergerak dengan berpedoman pada hukum. Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia menentukan dan mengacu arah dan sifat serta sikap aparatur dan masyarakat dalam menegakan hukum dan menaati hukum.

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam pembinaan dan pengembangannya. Dari sumber ajaranya, relitas kehidupan hukum masyarakat, sejarah pertumbuhanya, dan perkembangan hukum di Indonesia, yang menyangkut teori berlakunya hukum Islam di

⁶⁶Saefudin, *Ijtihat Politik* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 41.

⁶⁷Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 18.

Indonesia, terlihat ada beberapa teori yang sudah mantap dan dalam pertumbuhannya. Dari sumber ajaran Islam, terlihat ada banyak ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang menggambarkan bahwa orang yang beriman berkewajiban menaati hukum Islam. Tingkatan kehidupan beragam seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasulnya.⁶⁸

Demokrasi bagi sebagian umat Islam sampai dengan saat ini masih diperselisihkan. Ada yang menerima maupun menolaknya dengan secara tegas tentang pemakaian sistem demokrasi di Indonesia tersebut. Ada tiga pandangan Islam terhadap Demokrasi yaitu :⁶⁹

1. Antara agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan bahkan saling berlawanan ibaratnya agama vs demokrasi. Dalam masyarakat Islam terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa sebagian para ulama dan para penguasa politik memandang bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi paham demokrasi. Secara harfiah demokrasi berarti kekuasaan berada dalam genggamannya rakyat, sedangkan doktrin Islam mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Oleh karenanya demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para Rasul-rasul Allah selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan satu mayoritas.

⁶⁸ Rachmat Djatnika, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1999), h. 100.

⁶⁹ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 126.

Ada tiga pendapat yang mengatakan mengapa agama bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yaitu: *Pertama*, secara historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. *Kedua*, Secara filosofis mengatakan bahwa keterkaitan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, secara teologis dikatakan karena agama bersifat deduktif, metafisis, dan selalu menjadi rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, konkrit, dan bersifat dinamis, maka agama tidak memiliki kompetensi berbicara dan menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan maka manusia akan lebih leluasa, dan jernih berbicara soal demokrasi.⁷⁰

2. Antara agama dan demokrasi bersifat netral dimana keduanya berjalan sendiri-sendiri atau lebih populer dengan istilah sekularisasi politik. Ciri pokok dari kehidupan sekuler ini, yaitu adanya penekanan pada prinsip rasionalitas dan efisiensi yang diberlakukan dalam bidang kehidupan faktual empiris sehingga pada gilirannya agama semakin tersisih menjadi urusan pribadi. Jadi, dalam pandangan kedua ini antara agama dan demokrasi tidak terdapat titik singgung dimana ajaran agama tidak mengurus masalah agama.

⁷⁰A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Jakarta Press, 2000), h. 195.

3. Agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Agama secara teologis maupun sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi. Kehadiran agama senantiasa membawa imbas pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis. Di Indonesia sendiri lebih dominan menggunakan pendapat yang ketiga ini.

Pengejawataan Islam dalam ideologi negara dan pandangan hidup bangsa, merupakan salah satu model bagaimana Islam berhubungan dengan negara. Dalam kasus Indonesia, negara yang demikian majemuk susunan warga negara dan situasi geografisnya telah menempatkan Islam bukan satu-satunya agama yang ada. Dengan kata lain negara harus memberikan layanan yang adil kepada semua agama yang diakui. Negara pancasila dapat diterima ummat Islam di karena Islam tidak mengenal konsep negara Islam dan sistem pemerintahan yang definitif. Menurut Abdurrahman Wahid konsep negara Islam tidak dikenal dalam Al-Qur'an dengan menjelaskan sistem alih kepemimpinan negara (suksesi) yang berbeda-beda. Konsep suksesi sebagai bagian penting dalam sistem negara seharusnya jelas dan definitif dan hal itu ternyata tidak dimiliki oleh Islam.⁷¹

⁷¹Ali Masykur Musa, *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 103-104.

Mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, keadaan itu mendorong pada cita-cita pembentukan hukum nasional yang sesuai kepada cita-cita moral yang terbentuk oleh cita-cita batin dan kesadaran hukum rakyat Indonesia. Islam banyak mempengaruhi pemikiran dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia dan terbentuknya negara Republik Indonesia.⁷²

Menurut UUD 1945, hukum agama dan hukum Islam itu penting. Dalam UUD 1945 terlihat bahwa ajaran Islam masuk dan memberikan dasar pemikiran utama. Misalnya dalam alinea ketiga pada pembukaan UUD 1945 ada istilah “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa” dan juga istilah “musyawarah”.⁷³

Perbedaan dan persamaan demokrasi Indonesia dan demokrasi Islam dilihat dari pandangan M.Amien Rais yaitu persamaannya adalah sama-sama adanya pemilihan dan pengangkatan serta pertanggungjawaban terhadap negara dan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah rakyat tidak memegang kedaulatan mutlak, tetapi dibatasi oleh hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Adapun dasar hukum demokrasi menurut hukum Islam yaitu:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima

⁷² Rachmat Djatnika, *Op.Cit.*, h. 97.

⁷³ *Ibid.*, h. 98.

Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Kesemuanya di informasikan oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam surat (Al-Imran ayat 159), dan Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitupula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an disebarluaskan secara periwayatan oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

Berikut adalah fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia⁷⁴, antara lain:

- a. Sebagai هدى atau petunjuk bagi kehidupan manusia
- b. Sebagai رحمة atau keberuntungan yang diberikan Allah dalam bentuk kasih sayangNya.
- c. Sebagai فرقان atau pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat dilakukan dan yang terlarang dilakukan.
- d. Sebagai موعظة atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁷⁴Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 334.

- e. Sebagai بشرى atau berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia.
- f. Sebagai تبيان atau مبین yang berarti penjelasan terhadap segala sesuatu yang disampaikan Allah.
- g. Sebagai مصدق atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah.
- h. Sebagai نور atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- i. Sebagai تفصيل yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah.
- j. Sebagai شفاء الصدور atau obat bagi rohani yang sakit.
- k. Sebagai حَكِيم yaitu sumber kebijaksanaan.

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum demokrasi (musyawarah) yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an adalah firman Allah Surat Ali-'Imraan ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*⁷⁵

Maksud dari ayat ini adalah dalam menghadapi semua masalah harus dengan lemah lembut melalui jalur musyawarah untuk mufakat, tidak boleh dengan hati yang kasar dan perilaku kekerasan. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan setiap urusan. Apabila telah dicapai suatu kesepakatan, maka semua pihak harus menerima dan bertawakkal (menyerahkan diri dan segala urusan) kepada Allah. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertawakkal.

2. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-'Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya.⁷⁶ Hadits sering disebut sebagai cara

⁷⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 214.

⁷⁶M.M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), h.13.

beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- a. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
- c. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.⁷⁷

Al-Hadits merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Hadits yang menerangkan tentang demokrasi atau bermusyawarah adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابُ الْعَصْفَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ
الْوَلِيدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ
كَ قَالَ تَشَاوَرُوا أَلْفُقَهَاءَ وَالْعَابِدِينَ وَلَا تَمْضُوا فِيهِ رَأْيِي خَاصَّةً

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad, berkata telah mengabarkan kepada kami Syabab al-Ashfari, berkata telah mengabarkan kepada kami Nuh bin Qois dari al-Walid bin Sholih dari Muhammad bin Hanafiyah dari Ali berkata : bahwa

⁷⁷Ibid. , h. 14.

Rasulullah telah bersabda “bermusyawarahlah kalian dengan para ahli (fiqih) dan ahli ibadah, dan janganlah hanya mengandalkan pendapat otak saja (H.R Ath-Thabrani).⁷⁸

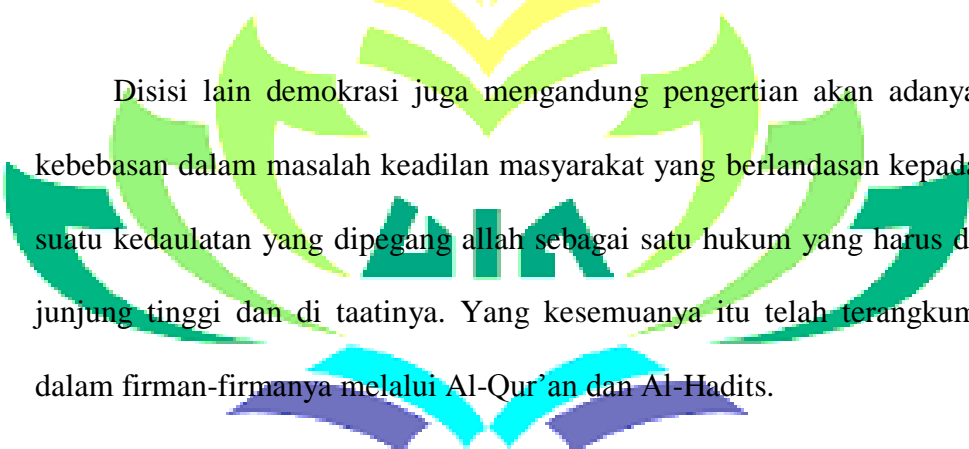
Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa harus bermula dengan musyawarah dan bermusyawarah juga dengan kaum-kaum beragama yang taat akan perintah Allah dengan ibadahnya yang sempurna atau para ahli yang pandai menyampaikan pendapat dan sesuai dengan keadaan maka janganlah kalian hendak menggunakan akal atau hati diri sendiri saja.

Hadits lain yang menjelaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin tercantum dalam Hadits nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا بَشَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّ قَدْ قَالَ (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁷⁸Imam Thabrani, *Mu'jam Al-Wustha (Al-Muktabah Syamilah)*, No 1618, Juz 2, h. 172.

Artinyai: Telah menceritakan kepada kami basyhar bin Muhammad berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, berkata telah mengabarkan kepada kami Yunus dari az-Zuhri berkata telah mengabarkan kepada kami Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar RA, darinya dari Rasulullah SAW, bersabda “setiap kamu adalah pemimpin, Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin, bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumahtangga, dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta kekayaan majikannya. Bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kata abdullah, agaknya Nabi SAW juga bersabda “laki-laki itu pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Kamu seluruhnya adalah pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (H.R Imam Bukhari).⁷⁹



Disisi lain demokrasi juga mengandung pengertian akan adanya kebebasan dalam masalah keadilan masyarakat yang berlandaskan kepada suatu kedaulatan yang dipegang Allah sebagai satu hukum yang harus di junjung tinggi dan di taatinya. Yang kesemuanya itu telah terangkum dalam firman-firman melalui Al-Qur'an dan Al-Hadits.

⁷⁹Imam Bukhari, *Shohih Bukhari (Al-Maktabah Syamilah)*, No ٨٥٣, Bab Al-Jama'atu Fii Al-Qori Wal Madani, Juz 1, h. 304.

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK M. AMIEN RAIS TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Biografi M. Amien Rais

1. Riwayat Hidup M. Amien Rais

M. Amien Rais dilahirkan di Kota Solo Jawa Tengah tepatnya pada tanggal 26 april 1944, yang merupakan anak dari pasangan Suhud Rais dengan ibu Sudalmiyah. Ayahnya adalah lulusan Mu'allimah Muhammadiyah Yogyakarta.⁸⁰ Semasa hidupnya beliau juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Departemen Agama, sementara sang ibu adalah alumni Hogere Inlandsche Kweekschool (HIK) Muhammadiyah, kemudian menjadi aktifis Aisyah (Organisasi Kewanitaan Muhammadiyah) dan pernah menjabat sebagai ketuanya di Surakarta selama dua puluh tahun dan beliau juga pernah mendapat gelar ibu teladan se-Jawa Tengah dan beliau aktif di Partai Politik (Parpol) Masyumi ketika masa jayanya pada tahun 1950-an.⁸¹

Jadi sosok M. Amien Rais dilahirkan dari keluarga yang sangat kuat dan kental warna Muhammadiyah, dari kedua orang tuanya yang sangat taat beribadah kepada Allah SWT. Dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam serta menegakan amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebenaran dan mencegah dari kemungkaran).

⁸⁰Muhammad Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1999), h. 5.

⁸¹Muhammad Nadjib, *Melawan Arus (Pikiran dan Langkah Politik Amien Rais)* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1999), h. 51.

Semenjak kecil telah dididik untuk menjadi seorang yang disiplin dan selalu bertanggung jawab dengan apa yang beliau lakukan dengan selalu tekun belajar membaca Al-Qur'an serta senantiasa gemar membaca buku-buku yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama Islam maupun buku-buku yang sifatnya umum.

Pendidikan yang di jalani oleh M. Amien Rais dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga sekolah menengah atas (SMA) dijalani di sekolah Muhammadiyah dikota kelahiranya (Solo). Makanya suatu kewajaran ketika M. Amien Rais tumbuh dan berkembang dengan nuansa Muhammadiyah.

Beliau masuk Sekolah Dasar (SD) tahun 1950 dan tamat pada tahun 1956, kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP) dan selesai pada tahun 1959 dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) dan selesai pada tahun 1962, selain itu juga beliau mengikuti Pendidikan Agama di Pesantren Mambaul Ulum, beliau juga pernah nyantri di Pesantren Al Islam.⁸²

M. Amien Rais selanjutnya meneruskan studynya dan memperoleh gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1967. Kemudian beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 1968. Kemudian melanjutkan study Stara Dua (S2) untuk meraih gelar MA di Universitas

⁸²*Ibid.*, h, 56-57.

Notre Dame Amerika Serikat dan memperoleh gelar MA ppada tahun 1974 dan memperoleh gelar Ph.D dari Universitas Cicago Amerika Serikat pada tahun 1981 dalam bidang Ilmu Politik. Beliau juga sempat mendapat gelar Mahasiswa Luar Biasa (MLB) di Universitas Al Azhar Cairo (Mesir) pada tahun 1978-1979. Pada tahun 1985 hingga 1989 beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Tabligh dan anggota Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta.⁸³

Pada tahun 1990, M. Amien Rais ikut memprakarsai dan mempopori atas berdirinya Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam yaitu Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beliau juga salah seorang dari 49 orang yang menandatangani pendirian ICMI dan beliau juga duduk sebagai Ketua Dewan Pakar dan Asisten 1 Ketua Umum.

Pada tahun 1993, laki-laki kelahiran Solo Jawa Tengah ini secara Aklamasi dikukuhkan menjadi Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah,⁸⁴ sejalan dengan karirnya beliau dinobatkan oleh Majalah Umum sebagai “Tokoh Tahun 1977” dan beliau juga mendapat penghargaan dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta atas komitmennya dalam rangkai menempuh perjuangan dakwah Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar.

⁸³Muhammad Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*, *Op.Cit.*, h. 5.

⁸⁴Muhammad Nadjib, *Op.Cit.*, h.73

Pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 23 Agustus dengan keberaniannya untuk mendirikan sekaligus memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) yaitu sebuah Partai Politik (Parpol). Sebuah Partai Politik yang memiliki wacana pembaharuan dan bersifat inklusif (terbuka) yang tidak terbatas dan terkekang oleh kemajemukan bangsa, suku, identitas, ras maupun agama.⁸⁵

Pada bulan Agustus 1999, M. Amien Rais menduduki puncak karirnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, yaitu lembaga tertinggi negara secara konstitusional yaitu sebagai lembaga rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian deskriptif singkat biodata dan perjalanan karir M. Amien Rais pada puncak kejayaannya terutama dalam perkembangan perpolitikan di Indonesia.

2. Karya-karya M. Amien Rais

Tingkat pemahaman M. Amien Rais dalam memahami terhadap Islam terutama pemahaman Islam di Indonesia memang telah tercermin dalam pola hidupnya semenjak masih kecil, pada saat itu M. Amien Rais telah begitu gandrung (senang) membaca buku-buku yang senantiasa dijumpai sehingga membentuk dirinya sebagai tokoh yang berwawasan kekinian.

⁸⁵ Muhammad Nadjib dan KS. Himmaty, *Amien Rais: dari Yogya ke Bina Graha* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 7.

Berbagai macam buku merupakan kebiasaanya untuk selalu membaca termasuk buku-buku yang bernuansa sejarah, politik, ekonomi maupun buku-buku yang berwawasan tentang keagamaan dan sosial. Kegemaran semacam ini telah beliau mulai semenjak pada Sekolah Dasar (SD) di Madrasah Ibtidakiyah, kegemaran M. Amien Rais untuk membaca buku hingga membuat keinginan ini terwujud setelah ia kembali dari menyelesaikan tugasnya sebagai Mahasiswa sampai beliau menyangand berbagai predikat Sarjana.

Banyak ide-ide pemikirannya tertuang dan dipublikasikan pada masyarakat khususnya masyarakat Islam di Indonesia melalui surat kabar, majalah dan banyak dituangkannya dalam karya-karya pemikirannya dalam bentuk buku-buku.

Adapun karya-karya pemikiran M. Amien Rais secara global sebagai berikut:

a. Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta

Buku ini merupakan buku pertamanya, berisikan tentang kumpulan tulisan-tulisan yang dimuatnya di berbagai media. Masa atau surat kabar serta sebagai suntingan dari berbagai Seminar dan Diskusi. Pada pokok isi buku ini M. Amien Rais menjelaskan beberapa masalah, seperti masalah tauhid, masalah negara dan masalah politik yang menyangkut tentang pemikiran Islam di Indonesia dewasa ini.

Akan tetapi secara global buku ini memuat empat pokok pembahasan yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagian pertama ini berisikan masalah tauhid, negara, politik.

Dalam bagian ini beliau menerangkan tentang arti tauhid, fungsi tauhid, hubungan antara politik dan dakwah serta wawasan Islam tentang ketatanegaraan.

- 2) Pada bagian kedua ini memuat tentang ikhtiar menemukan alternatif Islam yang berisikan tentang menyoroti krisis ilmu, sosial, tentang pembaharuan pemahaman Islam dalam perspektif serta kritik Islam terhadap Marxisme dan didalamnya juga berisikan tentang pengembangan ilmu dan teknologi dalam Islam.

- 3) Pada bagian ketiga ini yakni masalah intropeksi dan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyangkut pembahasan mengenai Islam dan radikalisme menghindari revolusi dan gerakan tiga puluh (Gestapu) Partai Komunis Islam (PKI) serta menyoroti masalah generasi muda dan politik di Indonesia.

- 4) Bagian keempat ini menyangkut kondisi agama Islam dan situasi dunia pada saat ini, pada bagian ini pembahasan tentang masalah sketsa komplik Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan pengaruh pada dunia ketiga serta dunia muslim juga didalamnya

berisikan tentang ideologi Al Ikhwanul Muslimin sebuah kasus gerakan Islam kontemporel.⁸⁶

b. Islam di Indonesia

Dalam buku ini mengetengahkan tentang kondisi ummat Islam, dimana didalamnya berisikan tentang kemajuan dan kemunduran ummat Islam, dalam buku ini nampaknya mengalami destruktif baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Dalam buku ini sebagai kajian utamanya adalah masalah percaturan perpolitikan di Indonesia, karena wacana ke-Islaman merupakan suatu masalah yang sensitif sekali sehingga mendorong tokoh-pemikir ini untuk ikut turun rembuk dalam mengkaji dan mendalami kajian politik dan Islam terutama di Indonesia, dalam hal ini M. Amien Rais mengelompokan pembahasan-pembahasan tentang tema tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pada bagian pertama ini berisis tentang anatomi para cendekiawan muslim Indonesia yang menggambarkan tentang berbagai peranan dan tanggung jawab cendekiawan muslim, baik dalam masalah politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan begitu juga tentang proses perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia.

⁸⁶Muhammad Amien Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Op.Cit., h. 245-247.

- 2) Pada bagian kedua ini berisi tentang Islam di Indonesia yang menyangkut masalah definisi.
- 3) Sedangkan pada bagian ketiga beliau menggambarkan tentang potensi krisis ummat Islam di Indonesia.
- 4) Bagian ke empat ini tentang profesionalisme Islam sebagai alternatif terhadap fundamentalisme dan oportunisme.
- 5) Pada bagian ini berisi tentang moral agama dan masalah kemiskinan pengantar tentang visi dan misi Islam dalam turut serta dalam kancan pembangunan.
- 6) Dalam bagian keenam ini mengenai Islam dan aspek-aspek pembangunan yang didalamnya berisikan tentang konsep Islam yang berkaitan dengan kerja dan aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat serta berhubungan dengan moral pembangunan.
- 7) Pada bagian ketujuh ini berisikan tentang dinamika kepemimpinan Islam dalam masa Orde Baru.
- 8) Bagian kedelapan ini memuat tentang Islam di Indonesia yaitu yang berkaitan tentang aspek perkumpulan antara cita dan realisasinya.
- 9) Pada bagian kesembilan ini berisikan tentang respon cendekiawan muslim terhadap tuntutan masyarakat.

10) Bagian kesepuluh ini berisikan tentang teorientasi tentang cara berfikir, bersikap dan bertindak.⁸⁷

c. Islam dan Pembaharuan (Ensiklopedi Masalah)

Buku ini membahas tentang pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya maupun pemahaman dalam bidang agama. Kenyataan ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi dampak prediksi publik yang mengatakan bahwa Islam pada waktu sekarang ini (zaman modern) yang disebut-sebut sebagai abad Informasi dan Globalisasi, dimana Islam mengalami staghnasi dan degradasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam masalah politik pembaharuan yang dimaksud bukan dalam ajaran Islam akan tetapi berkaitan dalam masalah pemahaman dan rektulisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam konteks kehidupan masyarakat khususnya pada bangsa Indonesia yang menjadi kajian inti pembaharuan disini mengarah pada bentuk-bentuk penafsiran tentang landasan budaya lokal dan berbagai bentuk pemahaman Non-Islam serta aneka ragam struktur pemerintah baik yang bernuansakan bagian ketimuran maupun budaya yang bersumber dari orang-orang Barat.

⁸⁷Muhammad Amien Rais, *Islam di Indonesia (Suatu Ikhtiar Mengaca Diri)* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 285.

Pada pola pembaharuan dalam penambahan tentang reaktualisasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan memang sangat diperlukan adanya pembaharuan. Hal ini menjadi aktual ketika pemahaman terhadap ajaran Islam menjadi rancu dan mengalami proses staghnasi (kemandekan) pemikiran oleh karenanya merupakan suatu yang tepat jika pembaharuan ini menjadi titik fokus dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dan masih banyak karya-karya M. Amien rais yang berupa hasil penelitian dan bentuk buku, antara lain:

- a. Prospek Perdamaian Timur Tengah 1980-an (Litbang Deplu RI)
- b. Politik Internasional Dewasa Ini (Surabaya: Usaha Nasional, 1989)
- c. Timur Tengah dan Krisis Teluk (Surabaya: Amarpress, 1990)\
- d. Keajaiban Kekuasaan, (Yogyakarta: Bentang Budaya-PPSK, 1994)
- e. Moralitas Politik Muhammadiyah, (Yogyakarta: Penerbit Pena, 1995)
- f. Demi Kepentingan Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- g. Refleksi Amien Rais, Dari Persoalan Semut Sampai Gajah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)
- h. Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- i. Suara Amien Rais Suara Rakyat, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- j. Amien Rais Sang Demokrat (Jakarta: Gema Insani Press. 1998)

- k. Amien Rais Menjawab Isu-isu Politik Kontroversialnya, (Bandung: Mizan, 1999)
- l. Melawan Arus: Pemikiran dan Langkah Politik Amien Rais (Jakarta: Serambi, 1999).

B. Pokok-pokok Pemikiran M. Amien Rais Tentang Demokrasi

M. Amien Rais sepakat dengan definisi demokrasi sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” (*government of the people and for the people*). Politik dan agama sering dipahami secara terpisah di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga seolah tidak ada keterkaitan fungsional dan organik antara politik dan agama serta politik dan dakwah. Bahkan ada kesan dalam masyarakat seolah-olah politik selalu mengandung kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, pengkhianatan, penipuan, dan berbagai konotasi buruk lainnya. Bagi M. Amien Rais persepsi politik yang demikian tentu cukup berbahaya. Ditinjau dari kaca mata agama dan dakwah, pandangan politik seperti ini juga sangat merugikan. Menurut M. Amien Rais, seorang politisi haruslah bersandar pada moralitas dan etika yang bersumber pada ajaran tauhid. Bila moralitas dan etika tauhid ini dilepaskan dari politik, maka politik itu akan berjalan tanpa arah, dan bermuara pada kesengsaraan orang banyak. Sebagaimana diungkapkan M. Amien Rais:

“Politik merupakan salah satu kegiatan penting, mengingat bahwa suatu masyarakat hanya bisa hidup secara teratur kalau ia hidup dan tinggal dalam sebuah negara dengan segala perangkat kekuasaannya. Sedemikian penting peranan politik dalam masyarakat modern, sehingga banyak orang berpendapat bahwa politik adalah panglima. Artinya,

*politik sangat menentukan corak sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.*⁸⁸

Dengan demikian, maka politik harus mengindahkan nilai-nilai agama dan fungsional terhadap tujuan dakwah. Politik yang fungsional terhadap tujuan dakwah adalah politik yang sepenuhnya mengindahkan nilai-nilai Islam. Dalam hubungan ini, M. Amien Rais menegaskan bahwa kehidupan politik yang Islami tidak memberikan tempat bagi sekulerisasi. M. Amien Rais menggambarkan yang dimaksud dengan sekulerisasi dan komponen-komponennya adalah, *disenchantment of nature*, desakralisasi politik, dan dekonsentrasi nilai-nilai. *Disenchantment of nature* berarti pembebasan alam dari nilai-nilai agama, agar masyarakat dapat melakukan perubahan dan pembangunan dengan bebas. Desakralisasi politik bermakna penghapusan legitimasi sakral atas otoritas dan kekuasaan, dan hal ini merupakan syarat untuk mempermudah kelangsungan perubahan sosial dan politik dalam proses sejarah. Sedangkan dekonsentrasi nilai-nilai, termasuk nilai-nilai agama, supaya manusia bebas mendorong perubahan-perubahan evolusioner tanpa terikat lagi dengan nilai-nilai agama yang bersifat absolut.

Namun, menurut M. Amien Rais, dengan demikian tidak berarti lantas kaum muslimin diperkenankan membangun negara sesuai dengan kemauan manusiawinya sendiri, dan terlepas dari ajaran-ajaran pokok (*fundamentals*) agama Islam. Bagi M. Amien Rais, membangun suatu negara yang terlepas dari *fundamentals* ajaran Islam berarti membangun negara yang sekulerisme

⁸⁸Firdaus Syam, *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. 143.

dan sekularisasi, yang kehilangan dimensi spiritual dan menjurus pada kehidupan yang serba-material, yang di dalamnya petunjuk wahyu hanya disebut-sebut secara berkala dalam kesempatan-kesempatan tertentu.⁸⁹

C. Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais

Mengingat M. Amien Rais adalah seorang demokrat, maka pemikiran-pemikiran beliau yang berkenaan dengan sistem demokrasi sangat banyak. Untuk itu penulis dengan sengaja tidak mencantumkan secara keseluruhan ide-ide pemikiran beliau tentang demokrasi, maka dalam tulisan ini penulis hanya mengungkap dua pokok pemikiran beliau tentang demokrasi yaitu sebagai berikut:

1. Negara dan Demokrasi

Pradigma pemikiran M. Amien Rais yang berpusat pada konsep tauhid mengandung implikasi teoritis bahwa seluruh dimensi kehidupan umat Islam harus berpatokan pada tauhid sebagai esensi dari seluruh ajaran Islam. Hanya dengan menumpukan seluruh aktifitas kegiatan hidup pada tauhid, umat Islam mencapai suatu kesatuan monoteisme yang meliputi semua bidang dan kegiatan hidup, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara dan pemerintahan, menurut M. Amien Rais:

“jika seorang muslim beranggapan bahwa Islam hanya berperan sebagai petunjuk yang berlaku dalam urusan-urusan rohaniah, sedangkan untuk urusan keduniaan ia mencampakan Islam dan menggantinya dengan sistem berfikir atau sistem sosial yang sepenuhnya bersifat man made dan berdasarkan pada etik

⁸⁹*Ibid.*, h. 145-147.

*konstitusional yang tanpa arah, maka ia adalah seorang muslim sekularis”.*⁹⁰

Dengan menetapkan tauhid sebagai poros sentral kehidupan, umat Islam dapat menarik atau mendeduksikan nilai-nilai etik, moral dan norma-norma pokok dalam ajaran Islam sebagai patokan dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut M. Amien Rais, ajaran pokok yang dideduksi dari tauhid itu merupakan kerangka referensi atau paradigma bagi aturan-aturan yang lebih rendah derajatnya, yang di buat berdasarkan akal manusia.

Pemikiran yang berpusat pada tauhid kemudian melahirkan teori-teori yang kesemuanya bertumpu pada syariah. Syariah merupakan prinsip-prinsip atau aturan universal yang mendeduksi tauhid kedalam sistem ajaran yang menjadi jalan hidup bagi umat Islam. Suatu masyarakat Islam, dengan demikian tidak mungkin mengambil sistem kehidupan selain syariah. syariah yang termuat dalam Al-Qor'an dan Al-Hadis telah memberikan skema kehidupan yang sangat jelas.

Bagi M. Amien Rais syariah merupakan sistem hukum yang lengkap dan terpadu yang telah meletakkan dasar-dasar, tidak saja bagi hukum konstitusional, tetapi juga hukum administratif, pidana, perdata, bahkan hukum internasional. Dalam konteks ini harus di pahami secara cermat, bahwa menurut M. Amien Rais Al-Qur'an dan Al-Hadis yang

⁹⁰Muzakki, *Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), h. 53.

merupakan konstruksi syariah yang permanen tidak berfungsi sebagai kitab hukum melainkan sebagai sumber hukum.⁹¹

Syariah sebagai sumber hukum yang ideal itu membutuhkan sebuah institusi yang mampu melestarikan prinsip universalnya sekaligus menjaga pelaksanaannya dalam praktis kehidupan. Institusi yang dibutuhkan adalah negara. M. Amien Rais berpandangan bahwa mendirikan negara merupakan suatu kewajiban agama demi terjaganya dan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Negara adalah penjaga syariah agar syariah tidak mengalami penyelewengan.

M. Amien Rais mengajukan tiga fundamen yang harus ditegakan untuk membangun suatu negara atau masyarakat, yaitu:

Pertama, negara harus dibangun atas dasar keadilan yang berarti pendirian suatu negara harus bertujuan untuk melaksanakan keadilan dalam yang seluas-luasnya, tidak sebatas pada keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial ekonomi. Keadilan hukum yang menjamin persamaan hak setiap orang di muka hukum belumlah cukup, karena tanpa keadilan sosial ekonomi, masih dapat timbul ketimpangan-ketimpangan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat.

Kedua, negara harus dibangun dan dikembangkan dalam mekanisme musyawarah. Prinsip ini menentang elitisme yang menganjurkan bahwa hanya para pemimpin sajalah yang paling tahu cara untuk mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat tidak lebih dari

⁹¹*Ibid.*, h. 74.

domba-domba yang harus mengikuti kemauan para elit. Menurut M. Amien Rais musyawarah merupakan pagar pencegah bagi kemungkinan munculnya penyelewengan ke arah otoritarisme, diktatorisme dan berbagai sistem lain yang cenderung membunuh hak-hak politis rakyat.

Ketiga, dalam sebuah negara prinsip kesamaan harus ditegakan. Islam, sebagaimana agama samawi yang lain yaitu yahudi dan kristen, tidak pernah membedakan manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin, warna kulit, status sosial, suku bangsa dan agama. Menurut ajaran dan tradisi ketiga agama ini, semua manusia berkedudukan sama di depan tuhan.⁹²

Tiga fundamen kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dikemukakan M. Amien Rais di atas adalah sama seperti yang dikemukakan oleh pemikir sekularis Islam asal Mesir, Ali Abdur Raziq. Dalam hal ini memang ada kemungkinan M. Amien Rais meminjam pemikiran politik Ar Raziq. Namun meskipun mempunyai asumsi dasar yang sama dengan Ar Raziq mengenai hal diatas, M. Amien Rais dengan tegas menyatakan perbedaanya dengan Ar Raziq.

Kemudian mengenai kekuasaan demokrasi dalam negara Indonesia, M. Amien Rais melalui Partai Amanat Nasional (PAN) berusaha agar politik ummat Islam Indonesia dapat menempatkan negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi lainya dan berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam dalam

⁹²*Ibid.*, h. 113-123.

masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umum. Politik hukum Islam menuntut terlaksananya demokrasi yang sebenarnya yang bersendikan keadilan (QS. Al Maidah :6), kemerdekaan atau kebebasan (QS. An Nisa :4), musyawarah (QS. Asy Syura :38), persamaan (QS. Al Hujurat :13), dan lain-lain. M. Amien Rais membenarkan bahwa Islam memang bersifat demokratis, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa semua hal termasuk hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam masih perlu dikukuhkan dalam permusyawaratan.

2. Demokrasi dan Masyarakat Kontemporer

Dalam buku ini M. Amien Rais berpendapat bahwa perjuangan ummat Islam untuk membangun masyarakat yang lebih baik, yaitu masyarakat yang didalamnya terkandung institusi amar ma'ruf nahi munkar berfungsi efektif, tidak bisa lain kecuali lewat demokrasi.

Sebelum menyajikan lebih jauh tentang pendapat-pendapat mengenai demokrasi pada masyarakat kontemporer, M. Amien Rais menyajikan prosesi sejarah pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah yang bernuansa demokrasi.

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi juga senantiasa dipraktikkan oleh para sahabat. Walaupun harus diakui bahwa pada masa tersebut tidak terdapat satu aturan baku terutama mengenai cara pengangkatan kepala negara atau kepala pemerintahan setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga pada masa tersebut tidak terdapat petunjuk atau

contoh tentang tatacara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala pemerintahan, dimana itu semua merupakan nilai-nilai dasar demokrasi. Bahkan sejarah Islam mencatat bahwa semua kepala pemerintahan mengakhiri masa tugasnya karena wafat.

Walaupun di zaman Khulafaur Rasyidin tidak ada aturan baku tentang masa jabatan khalifah, namun sejarah mencatat bahwa kehidupan pada waktu itu sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan negara yang menerapkan nilai-nilai demokrasi, dimana kehidupan masyarakatnya pada waktu itu kompak, teratur, serasi, saling hormat menghormati pendapat, persamaan hak dan kewajiban yang meliputi oleh suasana kerukunan dan kekeluargaan, baik didalam tubuh pemerintahan maupun diantara komponen masyarakat yang ada. Tetapi sayang bahwa kondisi yang seperti itu tidak didukung oleh realitas pemerintahan yang ada setelah masa Khulafaur Rasyidin.

Sejarah mencatat, bahwa menjelang ahir abad XIX pemikiran mengenai demokrasi dalam Islam mengalami perkembangan dan mulai timbul keaneka ragaman dan perbedaan pendapat yang cukup mendasar diantara para pemikir Islam. Hal itu terutama disebabkan oleh kemunduran dan kerapuhan dunia Islam, tantangan negara-negara Eropa terhadap integritas wilayah dunia Islam yang berujung pada dominasi atau penjajahan, keunggulan negara-negara Eropa dalam politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu ummat Islam tidak perlu atau bahkan jangan meniru pola organ lain dan supaya kembali kepada apa

yang telah diajarkan dalam ajaran Islam yakni kembali kepada pola zaman Rasulullah dan Khulafah Rasyidin.

Kembali pada sejarah, ternyata corak suatu pemerintahan dalam Islam itu beraneka ragam. Di era Dinasti Bani Umayyah tidak sama corak pemerintahannya dengan era Khulafaur Rasyidin. Pada era Dinasti Bani Abbasiyah juga berbeda. Menurut penulis memang sulit menentukan dan memilih mana dari corak atau bentuk pemerintahan yang harus diambil sebagai contoh, mengingat corak atau bentuk pemerintahan adalah salah satu bagian integral dari suatu demokrasi. Corak atau sistem pemerintahan demokrasi itu tidak semata-mata ditentukan oleh prinsip-prinsip ajaran saja, tetapi juga banyak ditentukan oleh situasi lingkungan, sejarah, latar belakang, budaya dan tingkat perkembangan intelektual serta peradapan. Singkatnya Islam tidak terdapat satu sistem pemerintahan yang baku. Ummat Islam bebas menganut sistem pemerintahan yang bagaimanapun termasuk sistem demokrasi asalkan sistem tersebut menjamin persamaan antara para warga negaranya, baik hak atau kewajiban dan juga dimuka hukum dan pengelolaan negara diselenggarakan atas musyawarah dengan berpegang kepada tata nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam bagi peradapan manusia.

Masih menurutnya, ada tiga alasan M. Amien Rais menjadikan demokrasi sebagai prefensi terbaik bagi Islam ataupun pengembangan masyarakat negara. *Pertama*, demokrasi tidak saja merupakan bentuk

vital dan terbaik pemerintah yang mungkin diciptakan, tetapi juga merupakan suatu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. *Kedua*, demokrasi sebagai sistem politik yang pemerintahan mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno, sehingga ia tahan banting yang dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. *Ketiga*, demokrasi merupakan suatu sistem yang paling alamiah dan manusiawi, sehingga semua rakyat di negara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.⁹³

Kriteria-kriteria demokrasi yang dikemukakan M. Amien Rais ada sepuluh macam, namun tidak akan dikemukakan seluruhnya karena dari seluruh kriteria yang dimaksud ada yang sama secara substansial. Yaitu sebagai berikut:

Pertama, partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Kedua, persamaan di depan hukum. Menurut M. Amien Rais, negara demokrasi selalu merupakan negara hukum. Rule Of Law harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, ras, status sosial. Persoalan yang sangat signifikan dalam negara demokrasi bukan saja soal perlakuan sama di depan hukum, tetapi juga proses pengambilan keputusan hukum dan pelaksanaannya produk-produk

⁹³Firdaus Syam, *Op, Cit.*, h. 171-174.

hukum atau aturan perundang-undangan dilapangan. Kedua aspek ini harus dilakukan secara konsisten dan adil dengan didukung oleh institusi kontrol yang independen.

Ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Konsep persamaan dalam demokrasi sebenarnya merupakan konsep yang utuh. Artinya, persamaan tidak bisa ditekankan pada salah satu aspek saja. Hukum dan politik hanya akan lengkap jika dibarengi di bidang sosial ekonomi. Untuk keperluan ini persamaan di sektor ekonomi tidak cukup sebatas de jure, tetapi juga de facto, agar persamaan yang dirumuskan justru tidak menjadi justifikasi atau titik masuk bagi eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Keempat, kesempatan pendidikan yang sama. Demokrasi bukan hanya merupakan sistem yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, tetapi juga sangat potensial untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, karena prinsip persamaan juga berlaku di dalam bidang pendidikan. Menurut M. Amien Rais, dalam masyarakat yang mulai memasuki tahap industrialisasi, pendidikan menjadi faktor krusial yang menentukan apakah seseorang dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Karena keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya, maka menjadi jelas bahwa dalam masyarakat yang masih senja distribusi pendapatannya pasti senja pula kesempatan pendidikannya. Tingkat pendidikan masyarakat ini akan sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan dan daya kritis mereka

yang pada gilirannya nanti akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dan pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan.

Kelima, kebebasan yang dijamin undang-undang. M. Amien Rais menyebut empat macam kebebasan yang inheren dalam sistem demokrasi, yaitu kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul atau berorganisasi, dan kebebasan beragama. Selain empat macam kebebasan ini masih ada kebebasan lain yaitu kebebasan atau hak untuk mengajukan petisi dan hak untuk protes atau beroposisi. Signifikasi hak protes adalah mencegah atau melakukan kontrol agar kekuasaan yang ada tidak mengarah kepada bentuk yang korup karena pada umumnya kekuasaan cenderung demikian.

Keenam, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpin, melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk itu rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka bagi mereka berbagai alternatif dan cakrawala masalah yang dihadapi. Utamanya, rakyat harus *well informed* mengenai politik pemerintah sehingga tidak ada sikap *a priori* menerima atau menolak kebijakan, apalagi bila kebijakan itu menyangkut suatu masalah yang prinsipil dan fundamental.

Ketujuh, mengindahkan etika politik. Demokrasi memiliki etika politik yang harus selalu diindahkan. Etika politik memang tidak pernah tertulis, tetapi sangat jelas bagi setiap orang yang paham tentang nilai-

nilai demokrasi. Tanpa etika politik, maka politik atau kekuasaan yang ada cenderung menghalalkan segala cara. Dalam bahasa agama Islam, etika politik yang dibutuhkan adalah *ahlaqul karimah*.

Kedelapan, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas dan memiliki kehidupan privat atau hak-hak pribadi, seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi. Hak untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, bentuk pendidikan, harus dijamin dalam sistem demokrasi, kecuali kalau kebebasan itu sudah merugikan pihak lain.

Kesembilan, semangat kerja sama. Kerjasama diantara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip-prinsip yang harus dikembangkan dalam sistem demokrasi. Demokrasi disatu sisi menghargai sikap hidup individualistik sebagaimana tercermin dalam pola hidup liberal, namun disisi lain, demokrasi juga mengembangkan sistem kolektifitas atau kerja sama misalnya dalam mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.⁹⁴

Apa yang dipaparkan diatas merupakan ekspresi pemikiran M. Amien Rais tentang demokrasi dalam relevansinya dengan nilai-nilai fundamental Islam. Pemikiran itu sendiri sudah memiliki basis teologis yang cukup mapan terutama karena adanya semangat tauhid di dalamnya. Pemikiran M. Amien Rais itu tentunya mengandung keuntungan-keuntungan keterbelakangan. Artinya, sebagai seorang intelektual yang

⁹⁴*Ibid.*, h. 148.

telah mempelajari sejarah politik Islam secara mendalam, M. Amien Rais kemudian berusaha menghindarkan diri dari kekurangan-kekurangan pemikiran politik Sunni sebelumnya dan sekaligus mengambil segi-segi positif yang masih aktual.



BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA MENURUT M. AMIEN RAIS

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini pada bab-bab sebelumnya, yakni tentang demokrasi di Indonesia baik secara umum maupun dalam pandangan Islam serta pemikiran M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia. Maka pada bagian ini penulis akan menganalisis secara fiqh siyasah pemikiran M. Amien Rais tentang demokrasi di Indonesia.

A. Pemikiran M. Amien Rais Tentang Demokrasi di Indonesia

Mengenai kekuasaan demokrasi dalam negara Indonesia, M. Amien Rais melalui Partai Amanat Nasional (PAN) berusaha agar politik umat Islam Indonesia dapat menempatkan negara Republik Indonesia berdampingan dengan negara-negara demokrasi lainnya dan berusaha menambah tersiarnya ideologi Islam dikalangan masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia umumnya.

Bagi M. Amien Rais syariah merupakan sistem hukum yang lengkap dan terpadu yang telah meletakkan dasar-dasar, tidak saja bagi hukum konstitusional, tetapi juga hukum administratif, pidana, perdata, bahkan hukum internasional. Dalam konteks ini harus di pahami secara cermat, bahwa menurut M. Amien Rais Al-Qur'an dan Al-Hadis yang merupakan kontruksi syariah yang permanen tidak berfungsi sebagai kitab hukum melainkan sebagai sumber hukum.

Syariah sebagai sumber hukum yang ideal itu membutuhkan sebuah institusi yang mampu melestarikan prinsip universalnya sekaligus menjaga

pelaksanaanya dalam praktis kehidupan. Institusi yang dibutuhkan adalah negara. M. Amien Rais berpandangan bahwa mendirikan negara merupakan suatu kewajiban agama demi terjaganya dan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Negara adalah penjaga syariah agar syariah tidak mengalami penyelewengan.

M. Amien Rais mengajukan tiga fundamen yang harus ditegakan untuk membangun suatu negara atau masyarakat. Tiga fundamen kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang dikemukakan M. Amien Rais adalah sama seperti yang dikemukakan oleh pemikir sekularis Islam asal Mesir, Ali Abdurr Raziq. Dalam hal ini memang ada kemungkinan M. Amien Rais meminjam pemikiran politik Ar Raziq. Namun meskipun mempunyai asumsi dasar yang sama dengan Ar Raziq mengenai hal diatas, M. Amien Rais dengan tegas menyatakan perbedaannya dengan Ar Raziq.

Kriteria-kriteria demokrasi yang dikemukakan M. Amien Rais ada sembilan macam, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan, (2) Persamaan di depan hukum, (3) Distribusi pendapatan secara adil, (4) Kesempatan pendidikan yang sama, (5) Kebebasan yang dijamin undang-undang, (6) Ketersediaan dan keterbukaan informasi, (7) Mengindahkan etika politik, (8) Kebebasan individu, (9) Semangat kerja sama.

M. Amien Rais mengakui, bahwa dalam rangka menegakan nilai-nilai demokrasi, negara Indonesia tidak harus menjadi negara Islam, karena menurutnya keabadian wahyu Allah justru terletak pada tidak adanya perintah

dalam Al-Qur'an dan Sunah untuk mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah). Seandainya ada perintah tegas untuk mendirikan negara Islam, maka Al-Qur'an dan Sunah juga akan memberikan tuntunan yang detail tentang struktur institusi-institusi negara yang dimaksudnya, sistem perwakilan rakyat, hubungan antara lembaga-lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif, sistem pemilihan umum. Bila demikian halnya, maka negara Islam itu tidak akan tahan jaman. Mungkin negara itu cocok dan sangat tepat untuk masa 14 Abad silam. Tetapi perlahan-lahan ia akan usang dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menanggulangi masalah-masalah modern yang timbul sejalan dengan dinamika masyarakat manusia.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kekuasaan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan dan kepada rakyat. Ini berarti setiap orang memegang kekuasaan wajib mempertanggung jawabkan dalam penggunaan kekuasaan tersebut. Inilah yang dikatakan M. Amien Rais bahwa suatu sistem kenegaraan yang demokrasi adalah dengan prasarana mental yang kuat.

B. Pandangan Fiqh Siyasah Tentang Demokrasi di Indonesia Menurut M. Amien Rais

Diketahui pula bahwa siyasah syariah adalah ilmu yang mempelajari hal ikhwal atau seluk beluk pengaturan urusan ummat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat. Dalam pandangan Islam, demokrasi itu

hanya sebagai satu kedaulatan hukum yang mutlak dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut, kedaulatan dan kekuasaan itu hanya ada di tangan Allah SWT dan kedaulatan itu dilimpahkan kepada ummat manusia melalui satu kekuasaan.

Selanjutnya bahwa didalam Al-Qur'an dan Sunah walaupun tidak secara eksplisit (tersurat) berbicara tegas tentang demokrasi, namun secara implisit (tersirat) secara umum terkandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berdemokrasi. Seperti prinsip musyawarah, prinsip kepemimpinan, prinsip kepastian hukum dan keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan masih banyak lagi prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berdemokrasi. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an, juga senantiasa dipraktikkan di jaman Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumber kepada wahyu Ilahi, serta bertanggung jawab atas segala tindakan beliau kepada Tuhan semata. maka beliau dalam segala urusan pemerintahan selalu beliau mengajak kepada para sahabat untuk bermusyawarah, anggota masyarakat dilibatkan dalam menentukan segala kebijakan pemerintahan.

Dari uraian di atas, diperoleh gambaran bahwa demokrasi secara umum memiliki kesamaan dengan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Islam, hanya saja yang membedakan hanyalah pada tataran aplikasi dilapangan, karena para pelaku demokrasi terkadang prilakunya tidak sesuai dengan nilai-

nilai yang ada di dalam demokrasi itu sendiri. Dengan demikian dapat di ambil benang merah bahwa demokrasi yang diperjuangkan oleh M. Amien Rais untuk mensinkronkan nilai-nilai yang terdapat di dalam demokrasi itu sendiri dengan nilai-nilai demokrasi dalam Islam, dalam fiqh siyasah dapat dibenarkan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, maka pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Berbagai ide dan pandangan yang dikemukakan oleh M. Amien Rais yang selalu mensinkronkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia secara umum dengan nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an seperti konsep persamaan, konsep kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat, konsep keadilan, kesejahteraan dan kebebasan dalam menentukan pilihan, konsep musyawarah untuk mencapai mufakat, dan lain-lain yang menjadi ruh dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.
2. Dalam Al-Qur'an atau hadis tidak ditemukan perintah untuk mendirikan negara Islam. Selanjutnya bahwa didalam Al-Qur'an dan Sunah walaupun tidak secara eksplisit (tersurat) berbicara tegas tentang demokrasi, namun secara implisit (tersirat) secara umum terkandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berdemokrasi. Seperti prinsip musyawarah atau syura, prinsip kepemimpinan, prinsip kepastian hukum dan keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan masih banyak lagi prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan dalam kehidupan berdemokrasi. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi sebagaimana yang tersirat dalam

Al-Qur'an, juga senantiasa dipraktikkan di jaman Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemimpin tunggal dengan otoritas yang berlandaskan kenabian dan bersumber kepada wahyu Ilahi, serta bertanggung jawab atas segala tindakan beliau kepada Tuhan semata. Maka beliau dalam segala urusan pemerintahan selalu beliau mengajak kepada para sahabat untuk bermusyawarah, anggota masyarakat dilibatkan dalam menentukan segala kebijakan pemerintahan. Yang terpenting adalah mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Saran

Pemerintah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam konteks politik Islam di Indonesia. *Pertama*, bagi para kaum akademik mahasiswa, dosen, pelajar, peneliti, dan para birokrat, anggaplah hasil dari penelitian ini merupakan wacana yang dapat meramaikan perbincangan metodologis dalam studi Islam terutama di Indonesia, yang lebih terkait lagi dengan *fiqh siyasah*. Mudah-mudahan percikannya yang sedikit setidaknya dapat menambah terangnya kajian *siyasah* yang terus akan melaju bersama dengan perubahan umat Islam dan bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kedua, dari hasil penelitian ini, setidaknya juga memiliki kelayakkan untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan

yang berbeda. Dengan demikian, kajian tentang politik Islam akan semakin menemukan bentuknya.

Dan terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini sangat kurang sempurna. Namun dari kekurangan sempurnaan tersebut, justru diharapkan akan dapat ditemukan arus lain dari kajian ini, oleh peneliti lain yang akan mengkaji pemikiran politik Islam kontemporer di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfani Riza Noer. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ariitkumto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azami M.M. *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Azra Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Bambang Agung. *Micheal Foucoult Tentang Kekuasaan*. Majalah Filsafat Driyarkara Thn. XII No. 2, 1996.
- Budiardjo Miriam. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid & Terjema*. Surakarta: Al-Karim, 2009.
- Diamond Larry. *The Democratic Revolution*. Diterjemahkan Oleh Matheos Nalle. *Revolusi Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Djatnika Rachmat. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1999.
- Ghofur Abdul. *Demokrasi Dalam Perspek Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hikam Muhammad A,S, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- IAIN Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*. Bandar Lampung, 2014.
- Imam Thabrani. *Mu'jam Al-Wustha (Al-Muktabah Syamilah)*. No 1618. Juz 2.
- Imam Bukhari. *Shohih Bukhari (Al-Maktabah Syamilah)*. No ٨٥٣. Bab Al-Jama'atu Fii Al-Qori Wal Madani. Juz 1.

- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Kadir Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 2004.
- Khallaf Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- KS. Himmaty dan Muhammad Nadjib. *Amien Rais: dari Yogya ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Mahfud Moh MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2003.
- Manan Bagir. *Teori Dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Fh UII Press, 2003.
- Masdar Amarudin. *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Maswadi Ruf. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: PT Rajawali, 1999.
- Musa Ali Masykur. *Pemikiran dan Sikap Politik Gusdur*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Muzakki. *Amien Rais Sang Pahlawan Reformasi*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- M.S., Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Najib Muhammad dan S., Kwat. *Amin Rais Sang Demokrat*. Jakarta: Gema Insani Pres, 1998.
- Nadjib Muhammad. *Melawan Arus (Pikiran dan Langkah Politik Amien Rais)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 1999.
- Nurtjahjo Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Pulungan J. Suyuti. *Fiqh Siyasah "Ajaran Sejarah dan Pemikiran"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rais Amien. *Islam di Indonesia (Suatu Ikhtiar Mengaca Diri)*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- _____. *Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1999.
- Saebani Beni Ahmadi. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Saefudin. *Ijtihat Politik*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Soemantri Sri. *Demokrasi Pancasila*. Bandung: Sinar Grafika, 1998.

Sihombing Frans Bona. *Demokrasi Pancasila Dalam Nilai-nilai Politik*. Jakarta: Erlangga, 1984.

Suvbagyo Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. Malang: UMM Pres, 2002.

Sumarsono. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Suryadi Budi. *Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2007.

Syam Firdaus. *Amien Rais dan Yusril Ihza Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Taher Perdi Elza (Ed). *Demokratisasi Politik, Budaya Dan Ekonomi*. Jakarta: Temprint, 1994.

Tarcisius Dewanto. *Pemisahan Moral dan Kekuasaan*. Jakarta: PT, Bumi Askara, 2006.

Tim Pena Prima. *Kamus Ilmiah Populer (Edisi Lengkap)*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Ubaidillah A. *Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. EdisiRevisi II, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

_____. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Jakarta Press, 2000.